



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai perkembangan dan teknologi;
- b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah perlu menyusun klasifikasi arsip untuk mendukung pengelolaan arsip nasional yang dinamis, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6501) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 551);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang dimuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip.
8. Klasifikasi masalah adalah penggolongan arsip yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip.
9. Kode Klasifikasi Arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenalan urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.
10. Kode komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengelola yang mengelola atau menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf ditempatkan di belakang nomor urut.
11. Kode pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya dan dituliskan di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.
12. Nomor urut adalah nomor urut naskah dinas yang dimulai dengan angka 01 (nol satu) dan seterusnya sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah dinas, meliputi permulaan tahun dan nomor urut dimulai kembali dengan angka 01 (nol satu).
13. Arsip statuter adalah arsip peraturan perundang-undangan seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur.
14. Indeks adalah ciri atau tanda dari naskah dinas merupakan kata rangkap yang akan dijadikan petunjuk dan pengenal untuk memudahkan penemuan kembali arsip.

15. Indeks Kaitan adalah indeks yang terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya.
16. Kartu Tunjuk silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberi petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas dan sebagai sarana petunjuk tentang adanya hubungan dengan file yang lainnya.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai pedoman arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.

Pasal 3

Ruang lingkup Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi:

- a. 000 Umum
- b. 100 Pemerintahan;
- c. 200 Keamanan;
- d. 300 Keamanan/Ketertiban;
- e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
- f. 500 Perekonomian;
- g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
- h. 700 Pengawasan;
- i. 800 Kepegawaian; dan
- j. 900 Keuangan.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perincian kedua, dan perincian ketiga.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 April 2022

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 April 2022

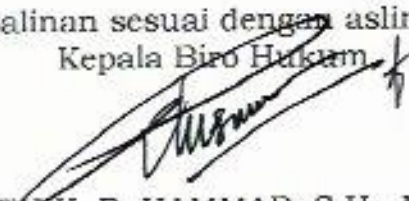
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Dr. ROBERT K. R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

A. BENTUK DAN SUSUNAN POLA KLASIFIKASI

1. Klasifikasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, juga berlaku bagi instansi Pemerintah Pusat yang ada di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta instansi lainnya yang berada di Daerah Provinsi. Klasifikasi tersebut disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, diberi kode dengan angka Arab, diperinci Desimal dengan mempergunakan Tiga Angka Dasar, dilengkapi dengan kode pembantu dan singkatan nama komponen.
2. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus. Dalam hubungan masalah didahului oleh perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola.
3. Angka 100 sampai dengan 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 700, 800 dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif, kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif di luar pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Di samping itu juga ditampung masalah masalah yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya.

Sepuluh pokok masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- 000 umum
- 100 Pemerintahan
- 200 Politik
- 300 Keamanan dan Ketertiban

- 400 Kesejahteraan
- 500 Perkonomian
- 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
- 700 Pengawasan
- 800 Kepegawaian
- 900 Keuangan

5. Kode pembantu merupakan penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul kaitan dengan masalah lainnya, ditambahkan di belakang tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:

- 01 Perencanaan
- 02 Penelitian
- 03 Pendidikan
- 04 Laporan
- 05 Panitia
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07 Statistik
- 08 Peraturan Perundang-undangan
- 09 ...

6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah, diperlukan kode dan singkatan nama komponen untuk Pemerintah Daerah Provinsi, diatur sebagai berikut:

Sekretariat Daerah	Setda
Asisten Pemerintahan, Hukum, dan HAM	Ass Pemhukham
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ass Ekbang
Asisten Kesejahteraan Rakyat	Ass Kesra
Asisten Administrasi	Ass Adm
Biro Pemerintahan Umum	Pemum
Biro Bina Otonomi Daerah dan Kerjasama	Otdaksm
Biro Hukum dan Ham	Hukham
Biro Perekonomian	Rek
Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah	BUMD
Biro Administrasi Pembangunan	Admbang
Biro Pelayanan Sosial Dasar	Yansos
Biro Pembangunan Sosial	bangsos
Biro Organisasi	Org
Biro Keuangan	Kcu

Biro Pengelolaan Barang Daerah	Pbd
Biro hubungan Masyarakat, Protokol,dan Umum	Humasprotum
Sekretariat DPRD	Setwan
Dinas Pendidikan	Disdik
Dinas Kesehatan	Diskes
Dinas Pendapatan	Dispenda
Dinas Sosial	Dissos
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disnakertrans
Dinas perhubungan	Dishub
Dinas Parawisata dan Kebudayaan	Disparbud
Dinas Bina Marga	Dis BM
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	Dis PSDA
Dinas Permukiman dan Perumahan	Diskimrum
Dinas Energi dan Sumber Daya mineral	Dis ESDM
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah	Diskop UMKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Disperindag
Dinas Pertanian Tanaman Pangan	Distan TP
Dinas Peternakan	Dinak
Dinas Perikanan dan Kelautan	Diskanlaut
Dinas Kehutanan	Dishut
Dinas Perkebunan	Disbun
Dinas Olah Raga dan Pemuda	Disorda
Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Disarpus
Inspektorat	Inspt
Badan perencanaan Pembangunan Daerah	BAPP
Badan Kepegawaian Daerah	BKD
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Badiklatda
Badan Ketahanan Pangan Daerah	BKP
Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu	BPMPPT
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	BPLHD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I	BKPPW- I
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II	BKPPW- II
Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III	BKPPW- III

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV	BKPPW- IV
Badan pemberdayaan dan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana	BP3APKKB
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	BPMPD
Kantor Perwakilan	Kpwk
Badan Penelitian dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi	BP3IPTEK
Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP
Rumah Sakit Jiwa	RSJ
Rumah Sakit Paru	RSP
Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan	RS Ihsan
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	Set KPID
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
Sekretariat KORPRI	Set KORPRI
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Set BAKORLUH

B. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami pola Klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang.

Tiap Kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasannya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar masalah 147,231 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 147,23 dan 147, 23 merupakan bagian dari 147,147 bagian dari 140 dan 140 bagian dari 100.

Di samping itu perlu diperhatikan khusus klasifikasi 100.

Contoh:

100	Pemerintahan	(Perincian Pertama)
140	Desa/Kelurahan	(Perincian Kedua)
147	Pembangunan desa	(Perincian Ketiga)

2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang paling tepat harus dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandang mana masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya

"perihal" surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali "perihal" tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode.

3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih harus paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali Arsip.
4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau terperinci. Masalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat secara berturut-turut diberi kode:
 - a. 188.342 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. 188.34 Peraturan Daerah
 - c. 188.3 Peraturan
 - d. 188 Peraturan perundang-undangan

Untuk instansi yang besar dapat mempergunakan pemberian kode dimaksud huruf a. Sedangkan makin kecil suatu instansi dapat mempergunakan kode di maksud huruf b atau huruf c yang lebih sederhana dan untuk instansi kecil misalnya kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf d.

5. Kode Pembantu.

Kode pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian yang lebih lanjut. Dengan ditambahkannya kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Contoh:

591	Tata Guna Tanah
.02	Perpetaan
147	Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
.13	Latihan Kerja Masyarakat
.135	Kurikulum/silabus

6. Menyusun Kode.

Untuk memperoleh kode yang spesifik, kode-kode masalah yang dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain.

Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700.

Perencanaan maupun proyek bangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dengan pola dari 000 sampai 900.

Begitu juga pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam klasifikasi.

7. Apabila pada kode ada petunjuk "tambahan perincian" berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode-kode yang lain.

Contoh I: Pasar

050 - Perencanaan (Proyek)

511.2 - Pasar (Bidang Perkonomian)

55.112 - Proyek Pasar

Contoh II: Proyek Jembatan

050 - Perencanaan

630 - Jembatan (Bidang Pekerjaan Umum)

056.3 - Proyek Jembatan angka 0 paling belakang sesuai. Titik desimal dihilangkan

8. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode dan 2 kode yang berlainan itu benar.

a. Peraturan pemerintah tentang pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 186.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun. Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (02).

b. Penelitian APPKD, dapat diklasifikasikan 070 (penelitian) atau 142.02 (penelitian APPKD 142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02).

Kedua cara pengklasifikasian sama-sama benar. Cara ini dimaksud untuk memberikan keleluasan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.

9. Tunjuk Silang

Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut dan mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan membuat kartu Tunjuk silang.

Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode: Satu kode diisikan pada kartu kendali dan satu kode lagi disisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah. Contoh Surat tentang "Persawahan untuk transmigrasi" dapat diberi kode 521.5 (pesawahan) dengan menunjukkan kode 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.

10. Indeks Kaitan

Untuk memudahkan penelusuran kode-kode disusun indeks kaitan. Indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya.

Dalam indeks kaitan letak kode ada di belakang masalah, sedangkan dalam pola diklasifikasikan ada di depan indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip.

C. PERINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN.

1. Perincian Pertama:

- 000 Umum
- 100 Pemerintahan
- 200 Politik
- 300 Keamanan/Ketertiban
- 400 Kesejahteraan Rakyat
- 500 Perekonomian
- 600 Pekerjaan Umum dan ketenagaan
- 700 Pengawasan
- 800 Kepegawaian
- 900 Keuangan

2. Perincian Kedua:

- 000 UMUM
- 010 Urusan Dalam
- 020 Peralatan
- 030 Kekayaan Dacrah
- 040 Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi

- 050 Perencanaan
- 060 Organisasi/Ketatalaksanaan
- 070 Penelitian
- 080 Konfrensi
- 090 Perjalanan Dinas

- 100 PEMERINTAHAN
- 110 Pemerintah Pusat
- 120 Pemerintahan Provinsi
- 130 Pemerintahan Kabupaten/Kota
- 140 Pemerintahan Desa/Kelurahan
- 150 DPR/MPR
- 160 DPRD Provinsi
- 170 DPRD kabupaten/Kota
- 180 Hukum
- 190 Hubungan Luar Negeri

- 200 POLITIK
- 210 Kepartaian
- 220 Organisasi Kemasyarakatan
- 230 Organisasi Profesi dan Fungsional
- 240 Organisasi Pemuda
- 250 Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan
- 260 Organisasi Wanita
- 270 Pemilihan Umum
- 280 Komisi Pemilihan Umum
- 290 Badan pengawasan Pemilu

- 300 KEAMANAN/KETERTIBAN
- 310 Pertanahan
- 320 Kemiliteran
- 330 Keamanan
- 340 Pertahanan Sipil
- 350 Kesejahteraan
- 360 Bencana
- 370 Kecelakaan
- 380 -
- 390 -

- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 410 Jaring pengaman Sosial
- 420 Pendidikan
- 430 Kebudayaan
- 440 Kesehatan
- 450 Agama
- 460 Sosial
- 470 Kependudukan
- 480 Media Massa
- 490 -

- 500 PEREKONOMIAN
- 510 Perdagangan
- 520 Pertanian
- 530 Perindustrian
- 540 Pertambangan Kesamuderaan
- 550 Perhubungan
- 560 Tenaga Kerja
- 570 Permodalan
- 580 Perbankan/Moneter
- 590 Agraria

- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
- 610 Pengairan
- 620 Jalan
- 630 Jembatan
- 640 Bangunan
- 650 Tata Kota
- 660 Tata Lingkungan
- 670 Ketenagaan
- 680 Peralatan
- 690 Air Minum

- 700 PENGAWASAN
- 710 Bidang pemerintahan
- 720 Bidang Politik
- 730 Bidang Keamanan/Ketertiban
- 740 Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 750 Bidang Perekonomian

- 760 Bidang Pekerjaan Umum
- 770 -
- 780 Bidang Kepegawaian
- 790 Bidang keuangan

- 800 KEPEGAWAIAN
- 810 Pengadaan
- 820 Pengangkatan dan Mutasi
- 830 Kedudukan
- 840 Kesejahteraan
- 850 Cuti
- 860 Penilaian
- 870 Tata Usaha
- 880 Pemberhentian
- 890 Pendidikan

- 900 KEUANGAN
- 910 Anggaran
- 920 Otoritas
- 930 Verifikasi
- 940 Pembukuan
- 950 Perbendaharaan
- 960 Pembinaan Kebendaharaan
- 970 Pendapatan
- 980 -
- 990 Bendaharawan

KLASIFIKASI ARSIP

Perincian Ketiga

000 UMUM

- 000 UMUM
 - 001 Lambang
 - .1 Garuda
 - .2 Bendera Kebangsaan
 - .3 Lagu Kebangsaan
 - .4 Daerah
 - .41 Provinsi
 - .42 Kabupaten/Kota
 - .5 LPND
 - .6 Lembaga Lainnya
 - 002 Tanda Kehormatan/Penghargaan (Untuk Pegawai Lihat Hal. 861. 10)
 - .1 Bintang
 - .2 Setyalencana
 - .3 Prasannya Purna Karya Nugraha
 - .4 Monumen
 - .5 Penghargaan Secara Adat
 - .6 Penghargaan Lainnya
 - 003 Hari Raya/Besar
 - .1 nasional 17 Agustus, hari Pahlawan dan Sebagainya
 - .2 Hari Raya Keagamaan
 - .3 Hari Ulang Tahun
 - .4 Hari-hari Besar Internasional
 - 004 Ucapan
 - .1 Ucapan Terima Kasih
 - .2 Ucapan Selamat
 - .3 Ucapan Belasungkawa
 - .4 Ucapan-ucapan Lainnya
 - 005 Undangan
 - 006 Tanda Jabatan
 - .1 Pamong Praja
 - .2 Tanda Pengenal
 - .3 Pejabat Lainnya
 - 007 -
 - 008 -

010 URUSAN DALAM

Gedung kantor/Termasuk Instalasi prasarana Fisik

011 Kantor/Dinas

.1 Prasarana Fisik Pamong Praja/Kantor Dinas

012 Rumah Dinas

.1 Tanah Untuk Rumah Dinas

.2 Prabot Rumah Tangga

.3 Rumah Dinas Golongan I

.4 Rumah Dinas Golongan II

.5 Rumah Dinas Golongan III

.6 Rumah/Bangunan Lainnya

.7 Rumah Pejabat Negara

013 Mess/Guest House/Panti/Wisma/Rumah Susun/Apartemen

014 Jasa Air

015 Pencerangan Listrik/Jasa Listrik

016 Jasa Telepon/Faximile/Internet

017 Jasa Keamanan

018 Jasa Kebersihan Kantor

019 Protokol

.1 Upacara Bendera

.2 Tata Tempat

.21 Pemasangan gambar Presiden, Wakil Presiden

.22 Pemasangan gambar Gubernur, Wakil Gubernur

.23 Pemasangan gambar Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota

.3 Audiensi menghadap pimpinan

.4 Alamat-alamat kantor dan pejabat

.5 Bandi/umbul-umbul, spanduk

.6 Launching

020 PERALATAN KANTOR

.1 Penawaran

021 Alat Tulis kantor

022 Mesin Kantor

023 Perabot kantor

024 Alat angkutan/kendaraan Dinas

025 Pakaian Dinas

- 026 Senjata/Alat Pengaman Kantor
- 027 Pengadaan Barang/Jasa
 - .1 Penunjukan Langsung
 - .2 Pemilihan Langsung
 - .3 Seleksi
 - .4 Lelang
- 028 Inventaris
- 029 -

- 030 KEKAYAAN DAERAH
 - 031 Sumber Daya Alam
 - 032 Aset Daerah
 - 033 Pemanfaatan Kekayaan Daerah
 - 034 Pengamanan Kekayaan Daerah
 - 035 Penghapusan Asset
 - 036 Kekayaan Lainnya
 - 037 Bangunan
 - 038 -
 - 039 -

- 040 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
 - 041 Perpustakaan
 - .1 Umum
 - .2 Khusus
 - .3 Perguruan Tinggi
 - .4 Sekolah
 - .5 Keliling
 - .6 Pengadaan Bahan Pustaka
 - .7 Pelayanan
 - .8 Pemeliharaan
 - 042 Dokumentasi
 - 043 Jaringan
 - .1 LAN
 - .2 WAN
 - 044 -
 - 045 Kearsipan
 - .1 Pola Klasifikasi
 - .2 Penataan Berkas
 - .3 Penyusutan

- .31 Jadwal Retensi Arsip
- .32 Pemindahan
- .33 Penyerahaan
- .34 Pemusnaan
- .4 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - .41 Arsip Aktif
 - .42 Arsip Inaktif
 - .43 Arsip Vital
- .5 Pengelolaan Arsip Statis
 - .51 Akuisisi
 - .52 Pengelolaan
 - .53 Preservasi
 - .54 Akses Arsip Statis
- .6 Pembinaan
- 046 Sandi
- 047 Website
- 048 Pengelolaan Data Elektronik
- 049 Jaringan Komunikasi Data

- 050 PERENCANAAN
 - 051 Bidang Pemerintahan
 - 052 Bidang Politik
 - 053 Bidang Keamanan/Ketertiban
 - 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 055 Bidang Perekonomian
 - 056 Bidang Pekerjaan Umum
 - 057 Bidang Pengawasan
 - 058 Bidang Kepegawaian
 - 059 Bidang Keuangan

- 060 ORGANISASI KETATALAKSANAAN
 - 061 Organisasi Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah
 - .1 Susunan Organisasi Tata Kerja
 - .2 Tata Tertib Kantor
 - 062 Organisasi/Badan Nonpemerintah
 - 063 Organisasi/Badan Internasional
 - 064 Organisasi/Badan Semi Pemerintah
 - 065 Ketatalaksanaan
 - .1 Tata naska Dinas

- .2 Stempel
 - .21 Stempel Jabatan
 - .22 Stempel Dinas
- .3 Papan nama Instansi pemerintah/Nonpemerintah
- .4 Organisasi yang diubah, digabung dan dihapus/Likuidasi
- 066 Tata Hubungan Kerjas
 - .1 Telaah Tata Hubungan
 - .2 Penyusunan
 - .3 Bimbingan
- 067 Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis
- 068 Standar Pelayanan Minimal
- 069 Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja
 - .1 Analisis Jabatan
 - .2 Hasil Analisis Jabatan
 - .3 Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional
- 070 PENELITIAN
 - 071 Riset
 - 072 Survei
 - 073 Kajian
 - 075 Kerja sama penelitian dengan Perguruan Tinggi dan Instansi lain
 - 076 Kerja sama penelitian dengan Kementerian lainnya
 - 077 Kerja sama Penelitian dengan Pemerintahan Daerah Lainnya
 - 078 Rekomendasi Penelitian
 - 079 Penempatan/Ekspose
- 080 KONFRENSI/RAPAT/SEMINAR
 - 081 Gubernur
 - 082 Bupati/Wali Kota
 - 083 Komponen Eselon Lainnya
 - 084 Instansi Lainnya
 - 085 Internasional di dalam negeri
 - 086 Internasional di luar negeri
 - 087 -
 - 088 -
 - 089 -

- 090 PERJALANAN DINAS
- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden di Dalam Negeri
 - 092 Perjalanan Menteri di Dalam Negeri
 - 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
 - 094 Perjalanan Pegawai termasuk pemanggilan Pegawai
 - 095 Perjalanan Tamu Asing ke daerah
 - 096 Perjalanan Gubernur/Wakil Gubernur ke Luar Negeri
 - 097 Perjalanan Pejabat Daerah ke Luar Negeri
 - 098 Perjalanan Pejabat Negara dan ke Luar Negeri
 - 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
- 100 PEMERINTAHAN
- Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Hubungan Luar
- 101 Bentuk Pemerintahan
 - 102 Sistem pemerintahan
 - 103 -
 - 104 -
 - 105 -
 - 106 -
 - 107 -
 - 108 -
 - 109 -
- 110 PEMERINTAH PUSAT
- 111 Presiden
 - Meliputi: Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian, dan sebagainya.
 - .1 Pertanggung Jawaban Presiden
 - .2 Amanat Presiden/Amanat kenegaraan
 - 112 Wakil Presiden
 - Meliputi: Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah serah terima jabatan, pemberhentian, dan sebagainya
 - 113 Susunan Kabinet
 - .1 Reshuffle
 - .2 Penunjukan Menteri Adinterim
 - .3 Sidang Kabinct
 - 114 Kementerian Dalam Negeri
 - Meliputi: Pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan

- .1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Kementerian Departemen Lainnya
Meliputi: Pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
- .1 Amanat Menteri Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
Meliputi: Pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
- 117 Lembaga Pemerintah Nonkementerian
- 118 Otonomi Daerah/Desentralisasi/Dekonsentrasi
- 119 Kerja sama antara Departemen

- 120 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
- .04 Laporan Daerah, tambahkan kode wilayah
- .042 Monografi, tambahkan kode wilayah
 - .1 Koordinasi
 - .2 Instansi Provinsi
- .21 Organisasi Perangkat Daerah
- .22 Instansi Vertikal
 - .3 Kerja sama antar Provinsi
- 121 Gubernur, tambahkan kode wilayah meliputi, pencalonan, pengangkatan pelantikan, serah terima jabatan, dsb
 - .1 Sambutan/pengarahan/Amanat Gubernur
- 122 Wakil Gubernur, tambahkan kode wilayah meliputi: pencalonan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan, dsb
- 123 Sekretaris Daerah Provinsi, tambahkan kode wilayah meliputi: pencalonan, serah terima jabatan
- 124 Pembentukan/pemekaran wilayah
 - .1 Pembentukan Daerah Otonomi
 - .2 perubahan Batas Wilayah
 - .3 Pemekaran Wilayah
 - .4 Penambahan ibu kota Provinsi, Pemberian dan penggantian nama kota, Daerah, gunung, sungai, pulau, selat, jalan dan sebagainya
- 125 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
 - .1 Pemerintah provinsi
 - .2 Panitia Anggaran Provinsi
 - .3 Seminar, Lokakarya dan lainnya

- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Otonomi Daerah
- 128 Swapraja/ Penataan Wilayah/ Daerah
- 129 Tugas Pembantuan

- 130 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - .04 Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - .1 Koordinasi
 - .2 Instansi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - .21 Dinas Otonom
 - .23 Instansi Vertikal
 - .3 Kerjasama antar Kabupaten/Kota
 - 131 Bupati/Wali Kota, tambahkan kode wilayah meliputi:
 - Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serta serah terima jabatan, pemberhentian, dan sebagainya
 - .1 Berita acara jabatan dan memori Bupati/Wali Kota
 - .2 Sambutan/pengarahan/amanat/Bupati/Wali Kota
 - 132 Wakil Bupati/Wali Kota, tambahkan kode wilayah meliputi:
 - pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian, dan sebagainya
 - 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, tambahkan kode wilayah meliputi:
 - Pencalonan, pengangkatan, Pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian, dan sebagainya
 - 134 Forum Koordinasi pemerintah di Daerah
 - .1 Muspida
 - .2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
 - .3 Forum Koordinasi lainnya
 - .4 Kerja sama antara kabupaten/kota
 - 135 Pembentukan/pemckaran wilayah
 - .1 Pembentukan Daerah Otonom
 - .2 Perubahan Batas wilayah
 - .3 Pemckaran Wilayah
 - .4 Permasalahan Batas wilayah
 - .5 Pemindahan ibu kota kabupaten/kota
 - .6 Pemberian dan penggantian
 - .7 Pemetaan Wilayah
 - 136 Pembagian Wilayah
 - 137 Penyerahan Urusan/Otonomi Daerah/Otonomi Khusus
 - 138 Pemerintahan kecamatan

- .1 Sambutan/pengarahan/Amanat Kepala Distrik
 - .2 Pembentukan Kecamatan
 - .3 Pemekaran
 - .4 Perluasan/perubahan batas Distrik
 - .5 Pemindahan ibu kota Distrik
- 139 Likuidasi Dinas/Badan/lembaga provinsi dan kabupaten/kota
- 140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
- 141 Pemerintahan Desa
- .1 Kepala Desa
Meliputi: Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian, dan sebagainya
 - .2 Badan Perwakilan Desa
Meliputi: Pembentukan, Keanggotaan, Kepengurusan dan kegiatan BPD
 - .3 Pengangkatan Desa
 - .31 Sekretaris Desa
Meliputi: pencalonan, penyeleksian, pengangkatan pemberhentian sementara
 - .32 Kepala Dusun
Meliputi: pencalonan, penyeleksian, pengangkatan pemberhentian sementara.
 - .33 Kepala Urusan
- 142 APPKD (Anggaran pendapatan Pengeluaran keuangan Desa)
- .1 Rutin (termasuk penghasilan pamong praja)
 - .2 Pembangunan
 - .3 Anggaran belanja tambahan
 - .4 Pendapatan Desa
 - .41 UrusanDesa
 - .42 Penerima yang berasal dari Pemerintah Pusat
 - .43 Penerima yang berasal dari pemerintah Provinsi
 - .44 Penerima yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - .45 penerima yang berasal dari pajak dan Retribusi Dacrah yang diserahkan kepada Desa
 - .46 Penerima dari pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar Desa
 - .47 Pendapatan Asli Desa

- .48 Penerimaan lain-lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- .49 Hasil dari gotong royong masyarakat
- 143 Kekayaan Desa
 - .1 Tanah Hak Pakai Desa
 - .11 Tanah Bengkok
 - .12 Tanah Titisara
 - .13 Tanah Pengangonan
 - .14 Tanah Desa Lainnya
 - .2 Jalan Desa
 - .3 Bangunan Desa
 - .4 Kekayaan Desa Lainnya
- 144 Lembaga-lembaga Desa
 - .1 LMD/BPD
 - .2 LKMD/LPM
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
 - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
 - .3 Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan
 - .4 Perubahan nama Desa/kelurahan
 - .5 Permasalahan Batas Desa
 - .6 Penyatuan Desa/kelurahan
 - .7 penghapusan Desa/Kelurahan
- 147 Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa
 - .1 Pembinaan usaha gotong royong
 - .11 swadaya gotong royong
 - .111 Penataan gotong royong
 - .112 Gotong royong dinamis
 - .113 Gotong royong statis
 - .114 Pungutan
 - .12 Lembaga Sosial
 - .121 Pembinaan
 - .122 Klasifikasi
 - .123 Proyek
 - .124 Musyawarah
 - .13 Latihan Kerja Masyarakat
 - .131 Kader masyarakat
 - .132 Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- .133 Pusat Latihan
- .134 Kursus-kursus
- .135 Kurikulum/silabus
- .136 Keterampilan
- .137 Pramuka
- .14 Pembinaan kesejahteraan Keluarga
 - .141 Program
 - .142 Pembinaan Organisasi
 - .143 Kegiatan
- .15 Penyuluhan
 - .151 Publikasi
 - .152 Peragaan
 - .153 Sosio Drama
 - .154 Siaran Pedesaan
 - .155 Penyuluhan Lapangan
- .16 Kelembagaan
 - .161 Kelompok Tani
 - .162 Rukun Tani
 - .163 Subak
 - .164 Dharma Tirta
 - .165 Mitra Cai
- .2 Perekonomian Desa
 - .21 Produksi Desa
 - .211 Pengelolaan
 - .212 Pemasaran
 - .222 Inventaris Desa
 - .223 Perkembangan/Pelaksanaan
 - .224 Bantuan/Simulasi
 - .225 Petunjuk/pembinaan pelaksana
 - .23 Koperasi Desa
 - .231 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
 - .232 Koperasi Unit Desa (KUD)
 - .24 Penataan Bantuan Pembangunan Desa
 - .241 Jumlah Desa yang diberi bantuan
 - .242 pengarahannya
 - .243 Pusat
 - .244 Daerah
 - .25 Alokasi bantuan Pembangunan desa
 - .251 Pusat

- .252 Daerah
- .26 Pelaksana Bantuan Pembangunan Desa
 - .261 Bantuan Langsung
 - .262 Bantuan Keserasian
 - .263 Bantuan Juara Lomba Desa
- .3 Prasarana Desa
 - .31 Pembinaan
 - .331 Lokasi
 - .332 Diskusi
 - .333 Pelaksanaan
 - .34 Masyarakat Pra Desa
 - .341 Pembinaan
 - .342 Penyuluhan
 - .35 Pemugaran perumahan dan Lingkungan Desa
 - .351 Rumah Sehat
 - .351 Proyek perintis
 - .353 Pelaksanaan
 - .354 Pengembangan
 - .355 Perbaikan Kampung
- .4 Pembangunan Desa
 - .41 Tingkat Perkembangan Desa
 - .411 Jumlah Desa
 - .4112 Pemekaran Desa
 - .4113 Pembentukan Desa Baru
 - .4114 Evaluasi
 - .4115 Bangun
 - .42 Unit Daerah Kerja Bangunan (UDKP)
 - .421 Penyusunan Program
 - .422 Lokasi UDKP
 - .423 Pelaksanaan
 - .424 Bimbingan/Pembinaan
 - .425 Evaluasi
 - .43 Tata Desa
 - .431 Inventarisasi
 - .432 Penyusunan Pola Tata Desa
 - .433 Aplikasi Tata Desa
 - .434 Evaluasi
 - .44 Perlombaan Desa
 - .441 Pedoman perlombaan Desa

- .442 Penilaian
- .443 Kejujuran
- .444 Piagam
- .5 Koordinasi
 - .51 Sektor khusus (K)
 - .52 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
 - .53 Team koordinasi Pusat
 - .54 Kerja Sama
 - .541 Luar Negeri
 - .542 Perguruan Tinggi
 - .543 Departemen/Lembaga Nondepartemen
- 148 Pemerintahan Kelurahan
 - .1 Kepala kelurahan meliputi: Pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara
 - .2 Sekretaris Kelurahan meliputi: pengangkatan, pemberhentian dan pemberhentian sementara
 - .3 Kepala Lingkungan meliputi: Pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara
 - .4 Administrasi Kelurahan
 - .5 Lembaga lembaga Tingkat Kelurahan
- 149 Lembaga Kelurahan
 - .1 Rukun Tetangga
 - .2 Rukun Warga
- 150 MPR/DPR/DPD
 - 151 Keanggotaan MPR
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Penggantian Antar waktu
 - .5 Pelanggaran
 - 152 Presiden MPR
 - 153 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
 - 154 Hak/saran/pendapat MPR
 - 155 keanggotaan DPR/DPD

- .1 Pencalonan
- .2 Pengangkatan
- .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
- .4 Pergantian Antar Waktu
- .5 Pelanggaran
- 156 Presiden DPR/DPD
 - .1 Sidang Pleno
 - .2 Dengar Pendapat
 - .3 Rapat Komisi
 - .4 Reses
 - .5 Rapat Fraksi
- 157 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan
- 158 Jawaban Pemerintah
- 159 Hak DPR
 - .1 Amandemen
 - .2 Angket
 - .3 Budget
 - .4 Interplasi
- 160 DPR PROVINSI
 - 161 Keanggotaan
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pelanggaran
 - 162 Persidangan
 - .1 Tata Tertib
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar Pendapat/Hearing/Dialog
 - .4 Rapat-rapat meliputi: Rapat panitia musyawarah, komisi, Fraksi, Panitia khusus, panitia anggaran dan sebagainya
 - .5 Reses
 - .6 Peninjauan Studi Banding

- .7 Kunjungan Kerja
- 163 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .11 Gaji/Honor
 - .12 Tunjangan
 - .2 Penghargaan
- 164 Hak DPR
 - .1 Budget
 - .2 Interplasi
 - .3 Amandemen
 - .4 Angket
 - .5 lainnya
- 165 Sekretaris DPRD
- 166 Alat Kelengkapan Dewan
 - .1 Badan Anggaran
 - .2 Badan Kehormatan
 - .3 Fraksi
 - .4 Lainnya
- 167 Tenaga Ahli DPRD
- 168 -
- 169 -
- 170 DPR KABUPATEN KOTA
 - 171 Keanggotaan
 - .1 pencalonan
 - .2 Perangkat
 - .3 Pemberhentian
 - .31 Recall
 - .32 Meninggal
 - .4 Pelanggaran
 - 172 Persidangan
 - .1 Tata Tertib
 - .2 Sidang Pleno
 - .3 Dengar Pendapat
 - .4 Rapat-rapat meliputi: rapat panitia, musyawarah, komisi, Fraksi Panitia anggaran dan sebagainya.
 - .5 Reses
 - .6 Peninjauan Studi Banding

173	Kesejahteraan
	.1 Keuangan
	.2 Penghargaan
174	Hak/Saran/Pendapat
175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
176	-
177	-
178	-
179	-
180	HUKUM
	.1 Konsitusi
	.11 Dasar Hukum
	.12 Undang-Undang Dasar
	.2 Amandemen
	.3 Amnesti/Abolisi/Grasi
181	Perdata
	.1 Perdata
	.2 Rumah
	.3 Utang/Piutang
	.31 Gadai
	.32 Hipotik
	.4 Notaris
182	Pidana
	.1 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
183	Peradilan
	.1 Jenis jenis Peradilan
	.11 Peradilan Umum
	.111 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
	.112 Pengadilan Tinggi
	.113 Mahkamah Agung
	.114 Mahkamah Konstitusi
	.12 Peradilan Agama Islam
	.121 Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama
	.122 Pengadilan Tinggi Agama Islam
	.123 Mahkamah Agung Agama Islam
	.13 Peradilan Militer
	.131 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
	.132 Mahkamah Militer Tinggi

- .133 Mahkamah Militer Agung
- .14 Peradilan Tata Usaha Negara
 - .141 Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
 - .142 Peradilan Tata Usaha Negara Tinggi
 - .143 Peradilan Tata Usaha Negara Agung
- .15 Peradilan Koneksitas
- .2 Upaya-upaya Hukum
 - .21 Banding
 - .22 Kosasi
 - .23 Derden Verzet
 - .24 Peninjauan Kembali
- .3 Eksekusi
 - .31 Penyitaan Lahan/Bangunan
- .4 Pembinaan Hukum
 - .41 Pembinaan Kesadaran Hukum (Kadarkum)
- .5 Bantuan Hukum
 - .51 Lembaga Bantuan Hukum
- 184 Hukum Internasional
- 185 Imigrasi
 - .1 Visa
 - .2 Paspor
 - .3 Exit/Permit
 - .4 Reentry
 - .5 Lintas Batas/Batas antar Negara
- 186 Kepenjaraan/Lembaga Perasyarakatan
- 187 Kejaksaan
 - .1 Saksi
 - .2 Terdakwa
- 188 Peraturan Perundang-undangan
 - .1 Tap MPR
 - .2 Undang-undang
 - .3 Peraturan
 - .31 Peraturan Pemerintah
 - .32 Peraturan Menteri
 - .33 Peraturan Lembaga Nondepartemen
 - .34 Peraturan Daerah
 - .341 Peraturan Daerah Provinsi
 - .342 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - .4 Keputusan

- .41 Presiden
- .42 Menteri
- .43 Lembaga Nondepartemen
- .44 Gubernur
- .45 Bupati/Wali Kota
- .5 Instruksi
 - .51 Presiden
 - .52 Menteri
 - .53 Lembaga Nondepartemen
 - .54 Gubernur
 - .55 Bupati/Wali Kota
- 189 Hukum Adat
 - .1 Tokoh Adat/Masyarakat
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI
 - 191 Perwakilan Asing
 - 193 Kerjasama Dengan Negara Asing
 - .1 Bilateral
 - .2 Mutilateral
 - .3 Regional (ASEAN)
 - .4 Internasional
 - 194 Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
 - .1 Kedutaan
 - .2 Konsulat
 - .3 Kuasa Usaha
 - .4 Atase
 - 195 PBB
 - .1 UNESCO
 - .2 UNICEF
 - .3 FAO
 - .4 UNHCR
 - .5 WHO
 - .6 Organisasi Lainnya
 - 196 Laporan Luar Negeri
 - 197 Hutang Luar Negeri (PHLN) LOAN
- 200 POLITIK
 - 201 Kebijakan Umum
 - 202 Orde Lama (1945-1965)

- 203 Orde Baru (1966-2000)
- 204 Orde Reformasi (2001-2004)
- 205 Orde Persatuan (2004)
- 206 Politik Dalam Negeri
- 207 Kewaspadaan Nasional
- 208 -
- 209 -

210 KEPARTAIAN

- 211 Lembaga Partai
- 212 Kartu Tanda Anggota
- 213 Bantuan Keuangan Parpol
- 214 Program Partai
- 215 AD/ART
- 216 Pengurus Partai
 - .1 Pimpinan Pusat
 - .2 Pimpinan Wilayah
 - .3 Pimpinan Cabang
 - .4 Pimpinan Anak Cabang
 - .5 Pimpinan Ranting
- 217 Pertemuan Partai
 - .1 Muktamar
 - .2 Munas
 - .3 Kongres
- 218 Kaderisasi Partai
- 219 Pembinaan Parpol

220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- 221 Ormas Berdasarkan Perjuangan
 - .1 Perintis Kemerdekaan
 - .2 Angkatan 45
 - .3 Veteran
- 222 Ormas Berdasarkan Kekaryaan
 - .1 PEPABRI
 - .2 Wreda Tama
- 223 Ormas Berdasarkan Kerohanian
 - .1 Nahdatul Ulama
 - .2 Muhammdiyah
 - .3 Persis

- .4 PGI
- .5 Dan Lain-lain
- 224 Lembaga Adat
- 225 Lembaga Swadaya Masyarakat
- 226 Ormas Berdasarkan Kedaerahan
 - .1 Paguyuban Pasundan
 - .2 dan lain-lain
- 227 Pembinaan dan Bantuan Keuangan Ormas
- 228 -
- 229 -

- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
 - 231 Organisasi Kesehatan
 - .1 Ikatan Dokter Indonesia
 - .2 Ikatan Bidan Indonesia
 - .3 Organisasi Kesehatan lainnya
 - 232 Organisasi Guru
 - .1 Persatuan Guru Republik Indonesia
 - .2 Organisasi Guru Swasta/Organisasi Guru lainnya
 - 233 Organisasi Sarjana
 - .1 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
 - .2 Persatuan Insinyur Indonesia
 - .3 Persatuan Sarjana Muda Indonesia
 - .4 Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia
 - 234 Organisasi Advokat/Pengacara
 - 235 Lembaga Bantuan Hukum
 - 236 Korps Pegawai Republik Indonesia
 - 237 Organisasi Wartawan Indonesia
 - .1 Persatuan Wartawan Indonesia
 - .2 Asosiasi Jurnalis Indonesia
 - .3 Organisasi Wartawan lainnya
 - 238 Organisasi Profesi Fungsional
 - .1 Asosiasi Arsiparis Indonesia
 - .2 Ikatan Pustakawan Indonesia
 - 239 Organisasi Profesi dan Fungsional lainnya

- 240 ORGANISASI PEMUDA
 - 241 Komite Nasional Pemuda Indonesia
 - 242 Organisasi Masyarakat

- 243 Organisasi Pelajar
- 244 Organisasi Pemuda Keagamaan
- 245 Organisasi Pemuda Kepartaian
- 246 Organisasi Pemuda lainnya
- 247 -
- 248 -
- 249 -

- 250 ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
 - 251 Organisasi Pekerja/Buruh
 - .1 Nasional
 - .2 Internasional
 - 252 Organisasi Petani
 - 253 Organisasi Nelayan
 - 254 Organisasi Angkutan Darat
 - 255 Organisasi Angkutan Laut
 - 256 Organisasi Angkutan Darat
 - 257 -
 - 258 -
 - 259 -

- 260 ORAGANISASI WANITA
 - 261 Dharma Wanita Persatuan
 - 262 Kongres Wanita Indonesia
 - 263 Ikatan Wanita Indonesia
 - 264 Persit Kartika candra
 - 265 Via Ardia Gharini
 - 266 Jalasenastri
 - 267 Bhayangkari
 - 268 Organisasi Wanita lainnya
 - 269 PKK

- 270 PEMILIHAN UMUM
 - 271 Pencalonan
 - 272 Nomor Urut Partai/Tanda Gambar
 - 273 Kampanye
 - 274 Petugas Pemilu
 - 275 Pemilih/Daftar Pemilih
 - 276 Sarana

- .1 TPS
- .2 Kendaraan
- .3 Surat Suara
- .4 Kotak Suara
- .5 Dana
- 277 Pemungutan/Perhitungan Suara
- 278 Penetapan Hasil Pemilu
- 279 Penetapan Perolehan Jumlah kursi dan calon terpilih
- 280 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 - 281 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
 - 282 Komisi Pemilihan Umum Provinsi
 - 283 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - 284 Panitia Pemilihan Kecamatan
 - 285 Panitia Pemungutan Suara
 - 286 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 - 287 Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan
 - 288 Sengketa Pemilu
 - 289 -
- 290 BADAN PENGAWAS PEMILU
 - 291 Badan Pengawas Pemilu Indonesia
 - 292 Badan Pengawas Pemilu Provinsi
 - 293 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
 - 294 Badan Pengawas Pemilu Distrik
 - 295 Pengawas Pemilu Lapangan
 - 296 Pengawas Pemilu Luar Negeri
 - 297 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
 - 298 Dewan Kehormatan Provinsi
 - 299 -
- 300 KEAMANAN/KETERTIBAN
 - 301 Keamanan
 - 302 Ketertiban
 - 303 Pengawasan Peraturan Perundang-undangan Daerah
 - .1 Pembinaan Pengawasan
 - .2 Penyelidikan dan Penyidikan
 - 304 Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
 - .1 Operasi dan Pengendalian
 - .2 Kerja sama

- 305 Sumber daya Aparatur Keamanan dan Ketertiban
 - .1 Pelatihan Dasar
 - .2 Pelatihan Teknis
- 306 Perlindungan Masyarakat
 - .1 Satuan Perlindungan Masyarakat
 - .2 Bina Potensi Masyarakat
- 307 -
- 308 -
- 309 -

- 310 PERTAHANAN
 - 311 Darat
 - 312 Laut
 - 313 Udara
 - 314 Intelijen
 - 315 Sistem Pertahanan
 - 316 -
 - 317 -
 - 318 -
 - 319 -

- 320 KEMILITERAN
 - 321 Latihan Militer
 - 322 Wajib Militer
 - 323 Operasi Militer
 - 324 Kekayaan TNI, Pejabat Sipil dan TNI
 - 325 Tentara Nasional Indonesia
 - .1 Angkatan Darat
 - .2 Angkatan Laut
 - .3 Angkatan Udara
 - 326 Alutsista
 - 327 Bela Negara
 - 328 Sarana dan Prasarana Militer
 - 329 -

- 330 KEAMANAN
 - 331 Kepolisian
 - .1 Polri
 - .2 Polisi Pamong Praja

- .3 Polisi Hutan
- .4 Polisi Khusus
- .5 Polisi Wanita
- 332 Huru-Hara/Demonstrasi
- 333 Senjata Api/tajam
- 334 Bahan Peledak
- 335 Perjudian
- 336 Surat-surat kaleng
- 337 Pengaduan
- 338 Himbauan/Larangan tentang keamanan dan ketertiban
- 339 Terorisisme

- 340 PERTAHANAN SIPIL
 - .1 Kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik Hansip
 - .11 Pengangkatan/pemberhentian Anggota Hansip
 - .12 Pengerahan dan pengendalian Hansip
 - .13 Kegiatan Pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa
 - .14 Pembinaan anggota Hansip/Linmas
 - .15 Penghargaan anggota Hansip
 - .16 Hansip/Linmas Lanjut Usia
 - .17 Data Matrik Hansip dan Menwa
 - .18 Pendidikan/latihan Hansip dan Menwa
 - .19 Latihan Keterampilan Pamswakarsa
 - .2 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh masyarakat
 - .21 Orientasi kesadaran bela negara bagi tokoh
 - .22 Pemberian tali asih bagi anggota
- 341 Perlindungan Sipil
- 342 Latihan Dasar
- 343 Suskalak A
- 344 Suskalak B
- 345 Suspim
- 347 -
- 348 -
- 349 -

- 350 KESEHATAN
 - 351 Mekar/Pemberontak
 - 352 Pembunuhan

353	Penganiayaan/Pencurian
	.1 Bunuh Diri
	.2 Keracunan
354	Subversi/Penyclundupan/Narkotika
356	Pemalsuan
354	Korupsi/Penyclewengan/penyalahgunaan Jabatan/KKN
357	Pemeriksaan/Pelecehan seksual
358	Kenakalan
359	Kcjahatan Lainnya
360	BENCANA
361	Gunung Berapi
362	Gempa
363	Angin Topan
364	Tanah Longsor
365	Kekeringan
366	Banjir
367	Kebakaran
368	Tsunami
369	Rob (Banjir Air Laut)
370	KECALAKAAN
371	Kecelakaan Darat
372	Kecelakaan Laut
373	Kecelakaan Udara
374	Sungai/Danau
375	Kecalakaan lainnya
376	-
377	-
378	-
379	-
380	PENANGGULANGAN BENCANA
381	-
382	-
384	-
385	-
386	-
387	-

388	-
389	-
390	SEARCH AND RESEARCH (SAR)
391	-
392	-
393	-
394	-
395	-
396	-
397	-
398	-
399	-
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Keluarga Pra Sejahtera
402	PNPM Mandiri Pedesaan
402	Jaminan Kesehatan Masyarakat
403	Subsidi
404	Program Raskin
405	Bantuan Langsung Tunai
406	Jaminan Sosial
407	Corporate Social Responsibility
408	-
409	-
410	PEMBANGUNAN DESA
411	Pembinaan Usaha Gotong Royong
.1	Swadaya gotong royong
.11	Penataan gotong royong
.12	gotong royong dinamis
.13	gotong royong statis
.14	pungutan
.2	Lembaga Sosial Desa
.21	Pembinaan
.22	Klasifikasi
.23	Proyek
.24	Musyawarah
.3	Latihan Kerja Masyarakat

- .31 Kader Masyarakat
- .32 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- .33 Pusat Latihan
- .34 Kursus-kursus
- .35 Kurikulum/silabus
- .36 Keterampilan
- .37 Pramuka
- .4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - .41 Program
 - .42 Pembinaan Organisasi
 - .43 Kegiatan
- .5 Penyuluhan
 - .51 Publikasi
 - .22 Diskusi
 - .23 Pelaksanaan
- .3 Masyarakat Pradesa
 - .31 Pembinaan
 - .32 Penyuluhan
- .4 Pemugaran Peraturan dan Lingkungan Desa
 - .41 Rumah Sihat
 - .42 Proyek Perintis
 - .43 Pelaksanaan
 - .44 Pengembangan
 - .45 Perbaikan Kampung
- 414 Pengembangan Desa
 - .1 Tingkat Pengembangan Desa
 - .11 Jumlah Desa
 - .12 Pemekaran Desa
 - .13 Pembentukan Desa
 - .15 Evaluasi
 - .16 Pengembangan
 - .2 Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
 - .21 Penyuluhan Program
 - .22 Lokasi UDKP
 - .23 Pelaksanaan
 - .24 Bimbingan/Pembinaan
 - .25 Evaluasi
 - .3 Tata Desa
 - .31 Inventarisasi

		.32	Penyusunan Pola Tata Desa
		.33	Aplikasi Tata Desa
		.34	Pemetaan
		.35	Pedoman Pelaksanaan
		.36	Evaluasi
	.4		Perlombaan Desa
		.41	Pedoman
		.42	Penilaian
		.43	Kejujuran
		.44	Piagam
415	Koordinasi		
	.1		Sektor Khusus
	.2		Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
	.3		Tim Koordinasi Pusat (TKP)
	.4		Kerjasama
		.41	Luar Negeri (UNICEF)
		.42	Perguruan Tinggi
		.43	Kementerian/Lembaga Nonkementerian
415	-		
417	-		
418	-		
419	-		
420	PENDIDIKAN		
	.1		Pendidikan khusus
			Klasifikasi di sini: pendidikan
421	Sekolah		
	.1		Pra sekolah Pendidikan usia Dini
	.2		Sekolah Dasar
	.3		Sekolah Menengah
	.4		Sekolah Tinggi
	.5		Sekolah Kejuruan
	.6		Kegiatan Sekolah
	.7		Kegiatan Pelajar dan mahasiswa
		.71	Reuni, Dharmawisata
		.72	Pelajar/Mahasiswa teladan
		.73	Resimen Mahasiswa
	.8		Sekolah Pendidikan Luar Biasa
		.81	Resimen Mahasiswa

- 422 .9 Sekolah Pendidikan Luar sekolah/Pemberantasan Administrasi Sekolah
 - .1 Persyaratan masuk sekolah, testing, pendaftaran, ospek
 - .2 Tahun Ajaran
 - .3 Hari Libur
 - .4 Uang Sekolah/SPP
 - .5 Beasiswa
 - .6 Kurikulum
- 423 Metode Belajar
 - .1 kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium/Seminar
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Kuliah Kerja Nyata
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Desertasi
 - .7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Pelatih
- 425 Sarana Pendidikan
 - .1 Gedung
 - .11 gedung Sekolah
 - .12 Kampus
 - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
 - .14 Perputakaan
 - .15 Laboratorium
 - .2 Buku Pelajaran
 - .3 Perlengkapan Sekolah
- 426 Keolahragaan

Klasifikasi di sini: PON, Porsade, Olimpiade dan sebagainya

 - .1 Cabang Olah Raga Termasuk Atlet
 - .2 Sarana Olah Raga
 - .21 Gedung Olahraga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam Renang
 - .3 Pesta Olah raga
 - .4 KONI
- 427 Kepemudaan

Meliputi: Organisasi, Sarana dan kegiatan remaja

Klasifikasi di sini: Gelanggang remaja/Gelanggang generasi muda

- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan
- 430 KEBUDAYAAN
 - 431 Kesenian
 - .1 Cabang Kesenian
 - .2 Sarana Kesenian
 - .3 Prasarana
 - .31 Gedung
 - .32 Padepokan
 - .4 Usaha Pertunjukan
 - 432 Kepurbakalaan
 - .1 Museum
 - .2 Peninggalan Kuno
 - .21 Candi, Peninggalan Kuno termasuk pemugaran
 - .22 Benda
 - 433 Sejarah dan Nilai Tradisional
 - 434 Bahasa
 - .1 Bahasa Indonesia
 - .2 Bahasa Daerah
 - .3 Bahasa Asing
 - 435 Usaha Pertunjukan, hiburan, kesenangan
 - .1 Upacara Adat
 - .2 Pakaian Adat
 - .3 Rumah Adat
 - 436 Kepercayaan
 - 437 Adat tradisional, pelestarian dan Revitalisasi Kebudayaan
 - 438 Perlindungan kebudayaan
 - 439 Kearifan Lokal Kesenian
- 440 KESEHATAN
 - 441 Pembinaan Kesehatan
 - .1 Gizi
 - .2 Mata
 - .3 Jiwa
 - .4 Penyakit Dalam, Kanker
 - .5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
 - .6 Perawatan

- .7 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
- .8 PIN (Pekan Imunisasi Nasional)
- 442 Obat-obatan
 - .1 Pengadaan
 - .2 Penyimpanan
- 443 Penyakit Menular, Pemberantasan Penyakit
 - .1 Pencegahan
 - .2 Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular langsung (P2ML)
 - .21 Kusta
 - .22 Kelamin
 - .23 Frambosia
 - .24 TBC
 - .25 HIV, AIDS
 - .3 Epidemiology dan karantina (Epidika)
 - .31 Kolera
 - .32 Imunisasi
 - .33 Surveilense
 - .4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Bintang (P2B)
 - .41 Malaria
 - .42 Dengue (Demam Berdarah)
 - .43 Filaria
 - .44 Serangga
 - .45 Rabies
 - .46 Antraks
 - .47 Flu Burung
 - .5 Sanitasi
 - .51 Tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan dan Minuman.
 - .52 Sarana Air Minum dan jamban keluarga (Samijaga)
 - .53 Pestisida
 - .54 Pencemaran Lingkungan
 - .6 Hygiene
 - .61 A. Paktoris
 - .62 IMA
 - .63 Hipertensi
 - .64 Stroke

- .65 Diabctes Melitus (DM)
- .66 CA. Service
- .67 CA. Mammae
- .68 CA. Hepak
- .69 CA. Paru
- .7 Dekopensatiokordis
- .71 PPOM
- .72 Asma
- .73 Kecelakaan Lalu Lintas
- .74 Psikosis
- 444 Gizi
 - .1 Kekurangan makanan, kelaparan, busung lapar
 - .2 Keracunan Makanan
 - .3 Menu Makanan
 - .4 Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
 - .5 Program Makanan Tambahan Amal Sekolah (PMTAS)
- 445 Rumah Sakit/Poliklinik
 - .1 RSUP
 - .2 Rumah Sakit Jiwa
 - .3 Rumah Sakit Mata
 - .4 Puskesmas
 - .5 Balai Kesehatan (Poliklinik)
 - .6 Balai Kesehatan ibu dan anak
 - .7 Rumah Sakit Bersalin
 - .8 Posyandu
 - .9 Rumah Sakit Paru
- 446 Tenaga Medis/Paramedis
- 447 Alat Medis
 - .1 Pengadaan Alat Kesehatan
 - .2 Penyimpanan Alat Kesehatan
 - .3 Standarisasi Alat Kesehatan
 - .4 Penghapusan Alat Kesehatan
- 448 Pengobatan Tradisional
 - .1 Pijit
 - .2 Tusuk Jarum
 - .3 Jamu Tradisional
 - .4 Dukun
- 449 Apotik/Toko Obat
 - .1 Surat izin

.2 Surat Izin Kerja

450 AGAMA

451 Islam

- .1 Peribadatan
 - .11 Sholat
 - .12 Zakat
 - .13 Puasa
 - .14 MTQ
 - .15 Haji
 - .16 Umroh
- .2 Rumah ibadah/Masjid/Mushola
- .3 Tokoh Agama
- .4 Pendidikan Agama Islam
 - .41 Tinggi
 - .42 Menengah
 - .43 Dasar
 - .44 Pondok Pesantren
 - .45 Gedung Sekolah
 - .46 Tenaga Pengajar
 - .47 Buku Agama
 - .48 Dakwah
 - .49 Organisasi/Lembaga Pendidikan
- .5 Harta Agama (Wakaf, Baitul Maal dsb)
- .6 Peradilan agama
- .7 Organisasi Keagamaan bukan politik majelis ulama
- .8 Mazhab

452 Protestan

- .1 Peribadatan
- .2 Rumah Ibadah/Gereja
- .3 Tokoh Agama, Rohaniwan, Pendeta, Domine
- .4 Mazhab
- .5 Organisasi Gereja

453 Katolik

- .1 Peribadatan
- .2 Rumah Ibadah/Gereja
- .3 Tokoh Agama, Rohaniwan, Pendeta, Pastor
- .4 Mazhab
- .5 Organisasi Gerejani

- 454 Hindu
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah Ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniwan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
 - .1 Peribadatan
 - .2 Rumah ibadah
 - .3 Tokoh Agama, Rohaniwan
 - .4 Mazhab
 - .5 Organisasi Keagamaan
- 456 Konghucu
- 457 -
- 458 -
- 459 -

- 460 SOSIAL
 - 461 Rehabilitasi Penderita Cacat
 - .1 Cacat Mata
 - .2 Cacat Tubuh
 - .3 Cacat Mental
 - .4 Bisu/Tuli
 - 462 Tuna Sosial
 - .1 Gelandangan
 - .2 Pengemis
 - .3 Tuna Susila
 - .4 Anak Nakal dan Narkoba
 - 463 Kesejahteraan Anak/Keluarga
 - .1 Anak Putus Sekolah
 - .2 Ibu Teladan
 - .3 Anak Asuh
 - 464 Pembinaan Pahlawan

Meliputi: penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya.

 - .1 Pahlawan
 - .2 Perintis Kemerdekaan

Meliputi: penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya.

- .3 Cacat Veteran

- 465 Kesejahteraan Sosial
 - .1 Lanjut Usia
 - .2 Korban kekacauan, pengungsi, repatriasi, korban tindak kekerasan

- 466 Sumbangan Sosial

Meliputi: penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar, dsb

 - .1 Korban Bencana
 - .2 Pencarian dana untuk sumbangan
 - .3 Panti Asuhan
 - .4 Yayasan/Panti Lainnya

- 467 Bimbingan Sosial

Meliputi: Bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman dsb

 - .1 Masyarakat Suku Asing

- 468 PMI

- 469 Makam
 - .1 Umum
 - .2 Pahlawan
 - .3 Khusus Keluarga, Raja
 - .4 Krematorium

- 470 KEPENDUDUKAN

- 471 Pendaftaran Penduduk
 - .1 Identitas Penduduk
 - .11 Biodata
 - .12 Nomor Induk Kependudukan
 - .13 Kartu Tanda Penduduk
 - .14 Kartu Keluarga
 - .15 Advokasi Identitas Penduduk
 - .2 Perpindahan Penduduk dalam wilayah Indonesia
 - .21 Perpindahan Penduduk WNI
 - .22 Perpindahan Penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
 - .23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
 - .24 Dacrah terbelakang/tertinggal
 - .24 Bedol Desa
 - .3 Perpindahan Penduduk Antar Negara

- .31 Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
- .32 Orang Asing Tinggal Sementara
- .33 Orang asing Tinggal Tetap
- .34 Perpindahan Penduduk antar Negara di wilayah perbatasan antar negara (Perlintasan batas tradisional)
- .4 Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
 - .41 Akibat bencana alam
 - .42 Akibat kerusuhan sosial
 - .43 Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
 - .44 Pendaftaran penduduk rentan
- 472 Pencatatan Sipil
 - .1 Kelahiran, kematian, dan advokasi
 - .11 Kelahiran
 - .12 Kematian
 - .13 Advokasi kelahiran dan kematian
 - .2 Perkawinan, Perceraian, dan Advokasi
 - .21 Perkawinan Agama Islam
 - .22 Perkawainan agama Non Islam
 - .23 Perceraian Agama Islam
 - .24 Perceraian Agama Non Islam
 - .3 Pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi pengangkatan anak
 - .31 Pengangkatan anak
 - .32 Pengakuan anak
 - .33 Pengesahan anak
 - .34 Perubahan anak
 - .35 Pembatalan anak
 - .36 Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan pengakuan, dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta
 - .4 Pencatatan Kewarganegaraan Anak
 - .41 Akibat perkawinan
 - .42 Akibat Kelahiran
 - .43 Nonperkawinan
 - .44 Nonkelahiran
 - .45 Perubahan WNI ke WNA
- 473 Informasi Kependudukan

- .1 Teknologi Informasi
 - .11 Perangkat Kertas
 - .12 Perangkat Lunak
 - .13 Jaringan Komunikasi Data
 - .2 Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
 - .21 Daerah Maju
 - .22 Daerah Berkembang
 - .23 Daerah Terbelakang
 - .3 Pengelolaan Data Kependudukan
 - .31 Pendaftaran Penduduk
 - .32 Kejadian Vital
 - .33 Kependudukan Nonregistrasi
 - .4 Pelayanan Informasi Kependudukan
 - .41 Media Elektronik
 - .42 Media Cetak
 - .43 Outlet
- 474 Perkembangan Penduduk
- .1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - .11 Struktur Jumlah
 - .12 Komposisi
 - .13 Fertilitas
 - .14 Kesehatan Produksi
 - .15 Mortalitas Penduduk
 - .16 Mortalitas Penduduk
 - .2 Pengembangan Kualitas Penduduk
 - .21 Anak dan Remaja
 - .22 Penduduk Usia Produktif
 - .23 Penduduk Lanjut Usia
 - .24 Gender
 - .3 Penataan Persebaran Penduduk
 - .31 Migrasi Antar Wilayah
 - .32 Migrasi Internasional
 - .33 Urbanisasi
 - .34 Sementara
 - .35 Migrasi Nonpermanen
 - .4 Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
 - .41 Pengembang Sistem Perlindungan Penduduk
 - .42 Pelayanan kelembagaan Ekonomi
 - .43 Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya

	.44	Partisipasi Masyarakat
.5		Pengembangan Wawasan Kependudukan
	.51	Pendidikan Jalur Sekolah
	.52	Pendidikan Jalur Luar Sekolah
	.53	Pendidikan Jalur Masyarakat
	.54	Pembangunan Berwawasan Kependudukan
475		Proyek dan Penyerasian Kebijakan Pendudukan
	.1	Indikator Kependudukan
	.11	Perumusan Penetapan dan Pengembangan Indikator Kependudukan
	.12	Pemanfaatan Indikator Kependudukan
	.13	Sosialisasi Indikator Kependudukan
	.2	Proyeksi Kependudukan
	.21	Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan
	.22	Pemanfaatan proyeksi kependudukan
	.3	Analisis Dampak Kependudukan
	.31	Penyusunan dan Pengembangan
	.32	Pemanfaatan Analisis Dampak Kependudukan
	.4	Penyerasian Kebijakan Lembaga Nonpemerintah
	.41	Lembaga Internasional
	.42	Lembaga Masyarakat dan Nirlaba
	.43	Lembaga Usaha Swasta
	.5	Penyerasian kebijakan lembaga pemerintah
	.51	Lembaga Pemerintah
	.52	Pemerintah Provinsi
	.53	Pemerintah Kabupaten/Kota
	.6	Analisis
476		Monitoring
477		Evaluasi
478		Dokumentasi
479		-

480 MEDIA MASSA

481		Penerbitan
	.1	Surat Kabar
	.2	Majalah
	.3	Buku
	.4	Penerjemahan

- .5 Press
- .6 Kliping Koran
- 482 Radio
 - .1 RRI
 - .2 Non RRI
 - .3 Luar Negeri
 - .4 Swasta
 - .5 Komunitas
- 483 Televisi
 - .1 TVRI
 - .2 Televisi Swasta
 - .3 Televisi Asing
 - .4 Televisi Lokal
- 484 Film
- 485 Pers
 - .1 Kewartawanan
 - .2 Wawancara
 - .3 Informasi Nasional
- 486 Grafika
- 487 Penerangan
 - .1 Pameran Nonkomersil
- 488 Press/Operation Room
- 489 Hubungan Masyarakat

- 490 PENGADUAN MASYARAKAT
 - 491 Surat Pembaca
 - 492
 - 493
 - 494
 - 495
 - 496
 - 497
 - 498
 - 499

- 500 PEREKONOMIAN
- 500 PEREKONOMIAN
 - .1 Dewan Stabilasi
 - .2 Komisi Ekonomi

- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perijinan pada umumnya, untuk perijinan suatu bidang
Klasifikasikan pada Masalahnya
- 504 Ekonomi Makro
- 505 Ekonomi Mikro
- 506 Ekonomi Kerakyatan
- 507 -
- 508 -
- 509 -

510 PERDAGANGAN

Klasifikasikan di sini: Tataniaga

- .1 Promosi Perdagangan
 - .11 Pekar Raya
 - .12 Iklan Produk
 - .13 Pameran Non Komersil
 - .14 Perlombaan (lomba Desa, Busana, Kerajinan)
 - .15 Pasar
 - .16 Pertokoan, Kios, PKL
- .2 Pelelangan, Distribusi
 - .21 Pemasaran Sembako
 - .22 Pemasaran Hasil Industri
 - .23 Penentuan Harga Pokok
- .3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
 - .31 Rencana dan Program Kerja
 - .32 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
 - .33 Pelaksanaan Teknis
 - .34 Pemantauan
 - .35 Evaluasi dan Pelaporan
- .4 Perijinan
 - .41 Penerbitan SIUP
 - .42 Perpanjangan
 - .43 Ijin Prinsip
 - .44 Rekomendasi
- .5 Perdagangan Antar Pulau
 - .51 Kerja sama Bahan Baku
 - .52 Industri Pemasaran
 - .53 Kontrak

- .6 Tera
 - .61 Tera Ulang Ukuran
 - .62 Takaran
 - .63 Timbangan
 - .64 Kalibrasi
 - .65 Cap Tanda Tera
 - .66 Biaya Tera
- .7 Bantuan Peralatan
 - .71 Proposal
 - .72 Surat Perjanjian/Kontrak
 - .73 Serah Terima
- .8 Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik
- .9 Kemetrolgian
 - .91 Standar Tingkat Tiga
 - .92 Standar Kerja Satuan Ukuran
 - .93 Standar Metrologi
 - .931 Peralatan
 - .932 Laboratorium Metrologi
 - .933 Tenki Ukuran Mobil
 - .934 Meter Tanki
 - .935 Kwh Meter
 - .936 SPBU
- 511 Pemasaran
 - .1 Sembilan bahan pokok, tambahkan kode wilayah, beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dsb
 - .2 Pasar
 - .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
 - .1 Ekspor Hasil Industri
 - .2 Ijin Ekspor
 - .3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
 - .4 Manajemen Perdagangan Internasional
 - .41 Kebijakan
 - .42 Pemasaran
 - .5 Pemberitahuan Ekspor Barang
 - .6 Pengawasan Mutu Barang
 - .7 Exporting Terdaftar

- .8 Evaluasi dan Pelaporan
- 513 Impor
 - .1 Ijin Impor
 - .11 Pemberian Ijin
 - .12 Pengendalian Ijin
 - .2 Standar Mutu dagang Impor
 - .3 Manajemen Perdagangan Internasional
 - .4 Kegiatan Impor
 - .41 Pembinaan Impor
 - .42 Pengendalian Impor
 - .43 Pemantauan Impor
 - .5 Faktor-faktor Pendukung
 - .6 Pengawasan Mutu Barang Impor
 - .7 Penyaluran Kegiatan Impor
 - .71 Bahan Komsumsi
 - .72 Bahan Baku
 - .73 Bahan Penolong
 - .8 Evaluasi dan pelaporan kegiatan impor
- 514 Perdagangan Antar Pulau
 - .1 Peti kemas
 - .2 Kerja sama bahan baku
 - .3 Industri Kemasan
 - .4 Kontrak
- 515 Perdagangan Luar Negeri
 - .1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
 - .11 Promosi dan Informasi
 - .12 Pameran
 - .13 Kerja sama
- 516 Pergudangan
 - .1 Peti Kemas
 - .2 Tangki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi
(Untuk BUUD, KUD Lihat Klasf . 147. 231-147. 232)
- 519 Metrologi

- 520 PERTANIAN
- 521 Tanaman Pangan
 - .1 Program

- .11 Bimas/Inmas termasuk kredit
- .12 Penyuluhan
- .2 Produksi
 - .21 Padi/panen
 - .22 Palawija
 - .23 Jagung
 - .24 Ketela Pohon
 - .25 Hortikulura
 - .26 Sayur/Buah-buahan
 - .27 Tanaman Hias
- .3 Sarana Usaha Pertanian
 - .31 Peralatan, meliputi Traktor dan peralatan lainnya
 - .32 Bantuan Peralatan
 - .33 Pembibitan
 - .34 Pupuk
- .4 Perlindungan Tanaman
 - .41 Penyakit Daun, Batang
 - .42 Pemberantasan Hama, meliputi: Penyemprotan, Penyiangan
 - .43 Gropyokan, sparyer, pemberantasan melalui udara
 - .44 Pestisida
- .5 Tanah Pertanian Pangan
 - .51 Persawahan
 - .52 Perladangan
 - .53 Kebun
 - .54 KTA/lahan kritis
- .6 Usaha Petani
- .7 Bina Usaha
- .8 Pasca Panen
- 522 Kehutanan
 - .1 Program
 - .11 Hak Pengusahaan Hutan
 - .12 Tata Guna Hutan
 - .14 Perpetaan Hutan
 - .2 Produksi
 - .21 Kayu
 - .22 Nonkayu

- .3 Sarana Usaha Kehutanan
- .4 Penghijauan, Reboisasi
- .5 Kelestarian
 - .51 Cagar Alam, Maraga Satwa, Suaka Marga satwa
 - .52 Berburu, meliputi: larangan dan ijin berburu
 - .53 Kebun Binatang
 - .54 Konservasi Lahan
 - .55 Kawasan Lindungan
- .6 Penyakit/Hama
- .7 Jenis-jenis Hutan
 - .71 Hutan Hidup
 - .72 Hutan Wisata
 - .73 Hutan Produksi
 - .74 Hutan Lindung
 - .75 Hutan Rakyat
- 523 Perikanan dan Kelautan
 - .1 Program
 - .11 Penyuluhan
 - .12 Teknologi
 - .2 Produksi
 - .21 Pelelangan
 - .3 Usaha Perikanan
 - .31 Pembibitan
 - .32 Dacrah Penangkapan
 - .33 Pertambakan meliputi: Tambak Ikan, Tambak Udang, dll
 - .34 Jaring Terapung
 - .4 Sarana
 - .41 Peralatan
 - .42 Kapal
 - .43 Pelabuhan
 - .5 Pengusaha
 - .6 Nelayan
 - .7 Data Perikanan
 - .8 Nelayan
 - .81 Perkampungan Nelayan
 - .82 Pelanggaran Kapal
 - .9 Pelestarian Ikan

- 524 Peternakan
 - .1 Produksi
 - .11 Susu Ternak Rakyat
 - .12 Telur
 - .13 Daging
 - .14 Kulit
 - .2 Sarana Usaha Ternak
 - .21 Pembibitan
 - .22 Kandang Ternak
 - .3 Kesehatan Hewan
 - .31 Penyakit Hewan
 - .32 Pos Kesehatan Hewan
 - .33 Tes Pullorum
 - .34 Karantina
 - .35 Pemberantasan penyakit hewan termasuk usaha pencegahannya
 - .4 Perunggasan
 - .41 Ayam Ras
 - .42 Ayam Buras
 - .43 Itik
 - .44 Burung
 - .5 Perkembangan ternak
 - .51 Inseminasi Buatan
 - .52 Pembibitan/Bibit Unggul
 - .53 Penyebaran Ternak
 - .6 Makanan Ternak
 - .7 Tempat pemotongan Hewan
 - .8 Data Peternakan
- 525 Perkebunan
 - .1 Program
 - .2 Produksi
 - .21 Karet
 - .22 Teh
 - .23 Tembakau
 - .24 Tebu
 - .25 Cengkeh
 - .26 Kopra
 - .27 Kopi
 - .28 Coklat

	.29	Aneka tanaman
	.3	Pembibitan
	.31	Gulma
	.4	Hama/Penyakit
	.41	Badra
	.5	Pengelolaan lahan
	.51	Terasering
526		Ketahanan Pangan
	.1	Program Bimbingan Massal
	.2	Pengembangan sarana Sumber Daya
	.21	Pembinaan Teknologi
	.22	Sarana Produksi dan Permodalan
	.23	Kelembagaan
	.3	Agribisnis
	.31	Mutu Hasil
	.32	Pengolahan Hasil pangan
	.33	Kemitraan
	.4	Distribusi Pangan
	.41	Sistem dan Pola Distribusi
	.42	Sarana dan Prasarana Distribusi
	.43	Pengadaan dan Cadangan Pangan
	.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman
	.51	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
	.52	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
	.53	Sistem Informasi Pangan
527		Perkembangan Ketahanan Pangan
	.1	Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan
	.2	Distribusi Harga Pangan
	.3	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
	.4	Konsumsi dan Keamanan Pangan
528	-	
529	-	

530 PERINDUSTRIAN

531	Industri Logam
532	Industri Mesin
533	Industri Kimia/Farmasi
534	Industri Tekstil
535	Industri makanan dan Minuman

- 536 Aneka Industri/Perusahaan
 - .1 Home Industri
- 537 Aneka Kerajinan
 - .1 Kerajinan Rakyat
- 538 Usaha Negara/BUMN
 - .1 Perjan
 - .2 Perum
 - .3 Persero/CV/PT
- 539 Perusahaan Daerah/BUMD/BULD

- 540 PERTAMBANGAN/KESAMUDERAAN
 - 541 Minyak Bumi
 - .1 Pengusahaan/Eksplorasi
 - 542 Gas Bumi
 - .1 Eksploitasi/Pengeboran
 - .11 Kontrak Kerja
 - .2 Pengelolaan, meliputi: tangki, pompa, tanker, terakhir, tanah liat, Pasir
 - 543 Aneka Tambang
 - .1 Timah
 - .2 Aluminium, boksit
 - .3 Besi
 - .4 Tembaga
 - .5 Batubara
 - 544 Logam Mulia: Emas, Intan, Perak
 - 545 Logam
 - 546 Geologi
 - .1 Vulkanologi
 - .11 Pengawasan Gunung Merapi
 - .2 Sumur Artetis
 - 547 Hidrologi
 - 548 Kesamuderaan
 - 549 Pesisir pantai/Kelautan

- 550 PERHUBUNGAN
 - 551 Perhubungan Darat
 - .1 Lalu Lintas jalan raya, sungai, danau
 - .11 Keamanan lalu lintas, rambu-rambu
 - .12 Ujian Kelayakan kendaraan bermotor (Kir)

- .2 Angkutan jalan raya
 - .21 Perijinan
 - .22 Terminal
 - .23 Alat Angkut
 - .24 Jembatan timbang/lebih muatan
- .3 Angkutan Sungai
 - .31 Perijinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .34 Keselamatan, rambu-rambu
 - .35 Lalu lintas
 - .36 Alur dan Kolam Pelabuhan
 - .37 Trayek
 - .38 Sarana/kapal
 - .39 Kecelakaan
- .4 Angkutan Danau
 - .41 Perijinan
 - .42 Terminal
 - .43 Pelabuhan
 - .44 Keselamatan, rambu-rambu
 - .45 Lalu Lintas
 - .46 Alur dan Kolam Pelabuhan
 - .47 Trayek
 - .48 Sarana/Kapal
 - .49 Kecelakaan
- .5 Feri
 - .51 Perijinan
 - .52 Terminal
 - .53 Pelabuhan
 - .54 Sarana dan Prasarana Kapal
 - .57 Treyek
 - .58 Sarana/Kapal
 - .59 Kecelakaan
- .6 Perkeretaapian
 - .61 Sarana (Lokomotif, Gerbong, Bogie)
 - .62 Signal
 - .63 Trayek
 - .64 Angkutan Penumpang
 - .65 Angkutan Barang

- .66 Kcsclamatan
 - .67 Kecelakaan
 - .68 Perawatan/Perbaikan
 - .69 Perijinan
- 552 Perhubungan Laut
- .1 Lalu Lintas Angkatan laut
 - .11 Keamanan Lalu Lintas, rambu-rambu, mercusuar
 - .12 Pelayaran Luar Negeri
 - .13 Pelayaran Dalam Negeri
 - .2 Perkapalan Alat Angkutan
 - .21 Kapal Penumpang
 - .22 Kapal Barang
 - .23 Kapal Perang/Patrol
 - .24 Kapal Tanker
 - .25 Ponton/Tonkang
 - .26 Kapal Layar
 - .27 Kapal Layar Motor
 - .28 Kapal Kontainer
 - .3 Pelabuhan
 - .31 Tanah/Lokasi
 - .32 Alur Layar
 - .33 Dermaga
 - .34 Terminal Penumpang
 - .35 Terminal Kontainer
 - .36 Bangunan/Gedung/Gedung
 - .37 Perlengkapan tambat labuh
 - .38 Lapangan
 - .39 Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus
 - .4 Pengerukan
 - .41 Alur Pelayaran
 - .42 Kolam Pelabuhan
 - .43 Reklamasi Pantai
 - .45 Pekerjaan Bawah Air (Soluage)
 - .5 Penjagaan Pantai
 - .51 Patroli Bandar
- 553 Perhubungan Udara
- .1 Angkutan Udara/Keamanan Lalu Lintas Udara
 - .2 Pelabuhan Udara

- .3 Alat Angkutan
- 554 Pos
- 555 Telekomunikasi
 - .1 Telepon
 - .2 Telegram
 - .3 Telex/SSB
 - .4 Faximile
 - .5 Satelit
 - .6 Stasiun Bumi, Parabola
 - .7 Wartel
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
 - .1 Izin Usaha Kepariwisataaan
 - .11 Izin Usaha Sarana Wisata
 - .12 Izin Usaha Objek dan Atraksi Wisata
 - .2 Wisatawan
 - .21 Wisatawan Mancanegara
 - .22 Wisatawan Nusantara
 - .3 Obyek Wisata dan Atraksi
 - .31 Obyek Wisata
Meliputi: Wisata Tirta, Situ, dan Marina Alam,
Wisata Remaja dan Sosial, Wisata
Konvensi, Budaya dan Religius.
 - .32 Atraksi
 - .321 Hiburan Umum
 - .4 Promosi Kepariwisataaan
 - .41 Sadar Wisata
 - .42 Mandala Wisata
 - .43 Tourism Information Centre
 - .44 Pameran Pariwisata meliputi: Pekan Pariwisata
dan Pata
 - .45 Taman Mini Indonesia Indah
 - .46 Bimas Pariwisata
 - .5 Perjalanan Wisata
 - .51 Biro Perjalanan
 - .52 Angkutan Umum
 - .6 Pramuwisata
Meliputi: Pramuwisata Madya, Pramuwisata Muda,
Pramuwisata Khusus
 - .7 Fasilitas Hotel

	.71	Hotel/Motel
	.72	Losmen/Penginapan
	.73	Penginapan Remaja
	.74	Pondok Wisata
	.75	Perkemahan
	.76	Restoran, Bar dan Diskotik
	.77	Rumah Makan
557		Metrologi
	.1	Ramalan Cuaca
	.11	Curah Hujan
	.12	Kemarau
558	-	
559	-	
560		TENAGA KERJA
	.1	Pengangguran
	.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI
	.3	Rekrutmen Calon TKI/TKW
	.4	Seleksi Tenaga Kerja Luar Negeri
	.41	Pendaftaran dan seleksi calon TKI/TKW
	.42	Berkas Persyaratan dan hasil Cek kesehatan
	.43	Perlindungan tenaga kerja pelayanan
	.44	Perlindungan TKI/TKW
	.5	Persyaratan TKI/TKW
	.51	Permohonan Rekomendasi Pasport
	.52	Perjanjian Kerja TKI/TKW Kartu
	.53	Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
	.54	Permohonan Fisikal Ke Luar Negeri
	.55	Pelatihan TKI/TKW
	.56	Perjanjian Kerja TKI dengan pengguna
	.57	Kurikulum Pelatihan TKLN
	.58	Kualifikasi dan kompetensi Instruktur TKLN
	.59	Ujian Kompetensi CTKI oleh LSP dan BNSP
	.6	Pemberangkatan Tenaga Kerja
	.61	Pemberangkatan Ke luar Negeri
	.62	Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri
	.63	Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
	.7	Pemulangan Tenaga Kerja

- .71 Kumpulan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis
 - .72 Pemulangan TKI/TKW Ilegal
 - .73 TKI/TKW
 - .74 Pelayanan CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia)
 - .75 Data dan Informasi Penempatan TKI
 - .76 Monitoring TKI
 - .77 TKI Bermasalah
 - .78 Bimbingan Pasca TKI
- 561 Upah
- .1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional
 - .2 Permohonan penangguhan pelaksanaan pembayaran upah Minimum kabupaten/kota dan Provinsi
 - .3 Kebutuhan Fisik Minimum
 - .4 Perhitungan upah kerja (termasuk di dalamnya upah lembur)
 - .5 Laporan dan Remittance
 - .6 Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
 - .7 Upah Minimum kabupaten/Kota
- 562 Penempatan Tenaga Kerja
- .1 Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja Mandiri (TKMT)
 - .11 Penempatan Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKMP)
 - .12 Penempatan Tenaga Kerja Non terdidik dan non profesional, Pengembangan kesempatan berusaha/ perluasan kerja
 - .2 Kesempatan Kerja Bersama (KKB)
 - .3 Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
 - .31 Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Jasa Tenaga Kerja Kerja Lokal/Daerah Antar Kerja Negara
 - .32 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
 - .33 Pencabutan Ijin penyalur jasa tenaga kerja (PJTKI/BKS/BKK)
 - .4 Informasi Pasar Kerja
 - .41 Bursa Pasar Kerja
 - .5 Ijin Tenaga kerja warga negara asing pendatang
 - .51 Antar Kerja Lokal
 - .52 Antar Kerja Antar Daerah
 - .53 Antar Kerja Antar Negara

- 54 Tenaga Kerja Antar Kerja Khusus (Wanita, Pemuda, Lansia Dan Penyandang Cacat)
- 563 Latihan Kerja
 - .1 Pendidkan Kerja
 - .11 Pendidikan dan Latihan Kerja
 - .12 Diklat di dalam Negeri (PKI., Prakerim, OJT)
 - .13 Diklat Di luar Negeri (Pemagangan)
 - .2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
 - .21 Tempat Pelatihan (BLK)
 - .2 Instruktur/Pelatih
 - .23 Modul/silabus dan bahan praktek
 - .24 Kurikulum
 - .25 Sertifikat
 - .3 Kerja sama Pelatihan Kerja
 - .4 Produktifitas Tenaga Kerja
 - .5 Pemagangan Tenaga Kerja
 - .51 Diklat Pemagangan
 - .6 Standarisasi Sertifikasi dan kompetensi
- 564 Tenaga Kerja Sukarela
 - .1 Butsi
 - .2 Padat kerja
- 565 Perselisihan Perburuhan
 - .1 Perselisihan dan Perkara Perburuhan
 - .11 Pengaduan Perkara Perburuhan
 - .12 Pemeriksaan Perkara
 - .13 Penyelidikan
 - .14 Sidang Perkara Perselisihan Buruh
 - .15 Hasil Putusan Sidang Perkara Persilisihan Buruh
 - .16 Peninjauan Kembali hasil putusan sidang KP2K
 - .17 Permintaan Eksekusi terhadap hasil putusan KP2K
 - .18 Daftar Usulan, susulan dan Penetapan Anggota KP2K
 - .2 Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - .1 Persclisihan dan perkara hukum Tenaga Kerja
 - .2 Pemakaian alat kesehatan kerja
 - .3 keterangan kelayakan atau pelindung diri (APD) dalam kerja
 - .4 Pengangkatan dan pembinaan Ahli keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)
 - .5 Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan keselamatan kerja

- .6 Pengujian dan hasil pemeriksaan Hyperkes
- .7 Gangguan lingkungan Tempat Usaha (Misal: suara, bising, Limba, dll)
- .8 Perlengkapan Sarana Kerja
 - .81 Pemasangan dan pemakaian lift (pesawat angkat/angkut)
 - .82 Pemasangan dan Pemakaian pesawat uap (ketel uap)
 - .83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
 - .84 Pemasangan dan Pemakaian tangki tak Bertekanan
 - .85 Pemasangan dan pemakaian alat pemadam Kebakaran
- .9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (Sift Malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
 - .1 Pengaduan PHK sepihak
 - .2 PHK Masal
 - .3 Bantuan Hukum Bagi Perkerja yang di PHK
 - .4 Ijin Melakukan PHK
 - .5 Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK
 - .6 Pemberian uang tunggu bagi pekerja yang di PHK
 - .7 Pemberian uang pcsangon bagi pckerja yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Pekerja/Buruh
 - .1 Bantuan Kredit/bantuan modal kerja bagi tenaga kerja
 - .11 Pemilihan Pekerja Teladan
 - .2 Perumahan Pekerja
 - .3 Keikutseraan Pekerja Dalam Program Jamsostek
 - .4 Koperasi Pekerja
 - .5 Perpustakaan Pekerja
 - .6 Tempat Ibadah Pekerja
 - .7 Rekreasi dan Olahraga Pekerja
 - .8 Lembaga Kerja sama Bipartit
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
 - .1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Kerja (IKTA)
 - .2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - .3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
 - .4 Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
 - .5 Data Tenaga Kerja Asing
 - .6 Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing, Perselisihan dan Pengaduan tenaga kerja Asing.
 - .7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing

- .8 PEMBERDAYAAN dan kontribusi Tenaga Kerja Asing
- .9 Tenaga Kerja Asing Ilegal

570 PERMODALAN

- 571 Modal Domestik
- 572 Modal Asing
 - .1 Kerja sama penanaman Modal Antar Provinsi
 - .2 Kerja sama Penanaman Modal Antar Kabupaten/Kota
- 573 Modal Patungan (Joint Venture) Penyertaan Modal
- 574 Pasar Uang Dan Modal
- 575 Saham
- 576 Belanja Modal
- 577 Modal Daerah
- 578 Bursa Efek
- 579 Obligasi

580 PERBANKAN/MONETER

- 581 Kredit
- 582 Investasi
- 583 Tabungan: Pembukaan, Penutupan rekening, Deposito
 - .1 Deposito
 - .2 Tabanas
 - .3 Rekening
 - .4 Hadiah Tabungan
- 584 Bank Pembangunan Daerah/Lembaga Perbankan
 - .1 Bank Pemerintah
 - .2 Lembaga Perbankan Daerah
 - .21 Lembaga Keuangan Kecamatan
 - .22 BPR
 - .3 Bank Swasta
 - .4 Bank Syariah
- 585 Asuransi Dana kecelakaan Lalu Lintas
 - .1 Polis
 - .2 Premi
 - .3 Tertanggung/Pemegang Polis
 - .4 Uang Pertanggungan
- 586 Alat Pembayaran Cck, Giro, Wesel, Transfer
- 587 Fiskal
- 588 Hutang Negara

590 AGRARIA

591 Tata Guna Tanah

- .1 Pemetaan dan Pengukuran
- .2 Perpetaan
- .3 Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
- .4 Fatwa Tata Guna Tanah
- .5 Tanah Kritis

592 Landreform

- .1 Radistribusi
 - .11 Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah Pertanian
 - .12 Penentuan Tanah Obyek Landreform
 - .13 Pembagian Tanah Obyek Landreform
 - .14 Sengketa Radistribusi tanah Obyek Landreform
- .2 Ganti Rugi
 - .21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
 - .211 Sengketa Ganti Tanah Kelebihan
 - .22 Ganti Rugi Tanah Absentee
 - .23 Ganti Rugi Tanah Partikelir
- .3 Bagi Hasil
 - .31 Penetapan Imbangan Bagi Hasil
 - .32 Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
 - .33 Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
- .4 Gadai Tanah
 - .41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .42 Pelaksanaan Gadai Tanah
 - .43 Sengketa Gadai Tanah
- .5 Bimbingan dan Penyuluhan
- .6 Pengembangan
- .7 Yayasan Dana Landreform (YDL)

593 Pengurusan Hak-hak Tanah

- .1 Sewa Tanah
 - .11 Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu: Tebu, Tambakau, Rosela, Corchrus
- .2 Hak Milik
 - .21 Perorangan
 - .22 Badan Hukum

- .3 Hak Pakai
 - .31 Perorangan
 - .311 Warga Negara Indonesia
 - .312 Warga Negara Asing
 - .32 Badan Hukum
 - .321 Badan Hukum Indonesia
 - .322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
 - .33 Tanah Gedung-Gedung Negeri
- .4 Guna Usaha
 - .41 Perkebunan Besar
 - .42 Perkebunan Rakyat
 - .43 Peternakan
 - .44 Perikanan
- .5 Hak Guna Bangunan
 - .51 Perorangan
 - .52 Badan Hukum
- .6 Hak Pengelolaan
 - .61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate
 - .62 Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
- .7 Sengketa
 - .71 Peradilan Perkara Tanah (Lihat juga 183)
- .8 Pencabutan Dan Pembebasan Tanah
 - .81 Pencabutan Hak
 - .82 Pembebasan Tanah
 - .83 Ganti Rugi Tanah
- 594 Pendaftaran Tanah
 - .1 Pengukuran/Pemetaan
 - .11 Fotogrametri
 - .12 Teristris
 - .13 Triangulasi
 - .14 Peralatan
 - .2 Dana Pengukuran
 - .3 Sertifikat
 - .4 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- 595 Tanah Untuk Transmigrasi
 - .1 Tata Guna Tanah
 - .2 Landreform

	.3	Pengurusan Hak-Hak Tanah
	.4	Pendaftaran Tanah
596	-	
597	-	
598	-	
599	-	

600

PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

601	Tata Bangunan, Konstruksi, Industri Konstruksi
602	Kontraktor Pemborong
	.1 Tender
	.2 Penunjukan
	.3 Prakuilifikasi
	.31 Daftar Rekanan Mampu
	.32 Tanda Daftar Rekanan
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
	.1 Tanah dan Batu (seperti: Batu Belah, Steen slag, Solit, Pasir, Korol Lempung, Kapur, Marmer)
	.2 Aspal
	.3 Besi dan Logam lainnya
	.31 Besi Beton
	.32 Besi Profil (konstruksi)
	.33 Baja
	.34 Paku
	.35 Aluminium Profil
	.4 Bahan-bahan Pelindung dan pengawet (Cat, Pengawet Kayu)
	.5 Semen
	.6 Kayu
	Seperti: Balok, Papan, Dolken, Plywood, Gabus, dsb)
	.7 Bahan Penutup Atap
	(Genteng, Asbes Gelombang, Seng, dsb)
	.8 Alat-alat Penggantung dan pengunci
	.9 Bahan-bahan Bangunan Lainnya

- 605 Instalasi
 - .1 Instalasi Bangunan
 - .2 Instalasi Listrik
 - .3 instalasi air/sanitasi
 - .4 Instalasi pengatur Udara
 - .5 Instalasi Akustik
 - .6 Istalasi cahaya/penerangan
- 606 Konstruksi Pencegahan
 - .1 Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
 - .2 Terhadap Gempa
 - .3 Terhadap Angin/Udara/Panas
 - .4 Terhadap Kegaduhan
 - .5 Terhadap Gas/Eksplosif
 - .6 Terhadap serangga
 - .7 Terhadap Radiasi atom
- 607 -
- 608 -
- 609 -

- 610 PENGAIRAN
 - 611 Irigasi
 - .1 Bangunan Waduk
 - .11 Bendungan
 - .12 Tanggul
 - .13 Pelimpahan Banjir
 - .14 Menara Pengambilan
 - .2 Bangunan Pengambilan
 - .21 Bendungan
 - .22 Bendungan Dengan Pintu Bilas
 - .23 Bendungan Dengan Pompa
 - .24 Pengambilan Bebas
 - .25 Pengambilan Bebas Dengan Pompa
 - .26 Sumur Dengan Pompa
 - .27 Kantung Lumpur
 - .28 Slit Ekstraktor
 - .29 Escape chanel
 - .3 Bangunan Pembawa
 - .31 Saluran
 - .311 Saluran Induk

- .312 Saluran Sekunder
- .313 Susplesi
- .314 Tersier
- .315 Saluran Kwartir
- .316 Saluran Pasangan
- .317 Saluran Tertutup/Terowongan
- .32 Bangunan
 - .321 Bangunan Bagi
 - .322 Bangunan Bagi dan Sedap
 - .323 Bangunan Sedap
 - .324 Bangunan Check
 - .325 Bangunan Terjun
- .33 Box Tersier
- .34 Got Miring
- .35 Talang
- .36 Siphon
- .37 Gorong-Gorong
- .38 Pelimpahan Samping
- .4 Bangunan Pembuang
 - .41 Saluran
 - .411 Saluran Pembuang Induk
 - .412 Saluran Pembuang Sekunder
 - .413 Saluran Pembuang Tersier
 - .42 Bangunan
 - .421 Bangunan Outlet
 - .422 Bangunan Terjun
 - .423 Bangunan Penahan Banjir
 - .43 Gorong-gorong Pembuang
 - .44 Talang Pembuang
 - .45 Siphon Pembuang
- .5 Bangunan Lainnya
 - .51 Jalan
 - .511 Jalan Inspeksi
 - .512 Jalan Logistik
 - .52 Jembatan
 - .521 Jembatan Inspeksi
 - .522 Jembatan Hewan
 - .53 Tangga Cuci
 - .54 Kubangan Kerbau

- .55 Waduk Lapangan
 - .56 Bangunan Penunjang
 - .57 Jaringan Telepon
 - .58 Stasiun Agro
- 612 Folder
- .1 Tanggul Keliling
 - .11 Bangunan Penutup Sungai
 - .12 Bangunan Penutup Sungai
 - .13 Jembatan
 - .2 Bangunan Pembawa
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Muka
 - .212 Saluran Pembawa Induk
 - .213 Saluran Sekunder
 - .22 Stasiun Pompa Pemasukan
 - .23 Bangunan Bagi
 - .24 Gorong-Gorong
 - .25 Siphon
 - .3 Bangunan Pembuang
 - .31 Stasiun Pompa Pembuang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran Pembuangan Induk
 - .322 Saluran Pembuangan Sekunder
 - .33 Pintu Air Pembuangan
 - .34 Gorong-Gorong Pembuangan
 - .35 Siphon Pembuangan
 - .4 Bangunan Lainnya
 - .41 Bangunan
 - .411 Bangunan Pengukur Air
 - .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
 - .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
 - .42 Rumah Petugas Eksploitasi
- 613 Pasang Surut
- .1 Bangunan Pembawa
 - .11 Saluran
 - .111 Saluran Pembawa Induk
 - .112 Saluran Pembawa Sekunder
 - .113 Saluran Pembawa Tersier

- .114 Saluran Penyimpan Air
- .115 Bangunan Pintu Pemasukan
- .2 Bangunan Pembuangan
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Pembuangan Induk
 - .212 Saluran Pembuangan Sekunder
 - .213 Saluran Pembuangan Tersier
 - .214 Saluran Pengumpulan Air/Penyimpanan Air
 - .22 Bangunan Pintu Pembuangan
- .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Kolam Lainnya/Pasang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran Lalulintas
 - .322 Saluran Muka
 - .33 Bangunan
 - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
 - .332 Bangunan Pengukur Muka Air
 - .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .34 Jalan
 - .35 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
 - .1 Bangunan Pengamanan
 - .11 Tanggul Banjir
 - .12 Pintu Pengatur Banjir
 - .13 Klep Pengatur Banjir
 - .14 Tembok Pengaman Talud
 - .15 Krib
 - .16 Kantong Lumpur
 - .17 Check Dam
 - .18 Siphon
 - .2 Saluran Pengaman
 - .21 Saluran Banjir
 - .22 Saluran Drainase
 - .23 Courpore
 - .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Warning Sistem
 - .32 Stasiun
 - .321 Stasiun Pengukur Hujan

- .322 Stasiun Pengukur Hujan
- .323 Stasiun Pengukur Cuaca
- .324 Stasiun Pos Penjagaan
- 615 Pengaman Pantai
 - .1 Tanggul
 - .2 Krib
 - .3 Bangunan Lainnya
- 616 Air Tanah
 - .1 Stasiun Pompa
 - .2 Bangunan Pembawa
 - .3 Bangunan Pembuang
 - .4 Bangunan Lainnya
- 617 -
- 618 -
- 619 -
- 620 JALAN
- 621 Jalan Kota
 - .1 Dacrah Penguasa
 - .11 Tanah
 - .12 Tanaman
 - .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - .22 Jembatan Sementara
 - .23 Kantor Proyek
 - .24 Gudang Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboratorium Lapangan
 - .27 Rumah
 - .3 Badan Jalan
 - .31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
 - .32 Stabilisasi
 - .4 Perkerasan (Pavemen)
 - .41 Lapisan Pondasi Bawah
 - .42 Lapisan Pondasi
 - .43 Lapisan Permukaan
 - .5 Drainage
 - .51 Parit Tanah

	.52	Gorong-Gorong
.6		Buku Trotoir
	.61	Tanah
	.62	Perkerasan
	.63	Pasangan
.7		Media/Medium
	.71	Tanah
	.72	Tanaman
	.73	Perkerasan
	.74	Pasangan
.8		Daerah Samping
	.81	Tanaman
	.82	Pagar
.9		Bangunan Pelengkapan dan Pengamanan
	.91	Rambu-rambu/Tanda-tanda lalu lintas
	.92	Lampu Penerangan
	.93	Lampu Pengatur lalu lintas
	.94	Patok patok KM
	.96	Rel Pengaman
	.97	Pagar
	.98	Turap Penahan
	.99	Bronjong
622		Jalur Luar Kota
	.1	Daerah Penguasaan
	.11	Tanah
	.12	Tanaman
	.13	Bangunan
.2		Bangunan Sementara
	.21	Jalan Sementara
	.22	Jembatan Sementara
	.23	Kantor Proyek
	.24	Gudang Proyek
	.25	Barak Kerja
	.26	Laboratorium Lapangan
	.27	Rumah
.3		Badan Jalan
	.31	Pekerjaan Tanah
	.32	Stabilisasi
.4		Perkerasan (Pavement)

	.41	Lapisan Pondasi Bawah
	.42	Lapisan Pondasi
	.43	Lapisan Permukaan
.5		Drainage
	.51	Parit
	.52	Gorong-gorong (Culvert)
	.53	Sub Drainage
.6		Buku Trotoir
	.61	Tanah
	.62	Perkerasan
	.63	Pasangan
.7		Median
	.71	Tanah
	.72	Tanaman
	.73	Perkerasan
	.74	Pasangan
.8		Dacrah Samping
	.81	Tanaman
.9		Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
	.91	Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu lintas
	.92	Lampu Penerangan
	.93	Lampu Pengatur lalu lintas
	.94	Potok-patok KM
	.95	Patok patok ROW (Sempadan)
	.96	Real Pengaman
	.97	Pagar
	.98	Turap Penahan
	.99	Bronjong
623		Pengaspalan
624		Pembetonan
625		Hotmix
626		-
627		-
628		-
629		-
630		JEMBATAN
	631	Jembatan Pada Jalan Kota
		.1 Dacrah Penguasaan

- .11 Tanah
- .12 Tanaman
- .13 Bangunan
- .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - .22 Jembatan Sementara
 - .23 Kantor Proyek
 - .24 Gudang Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboratorium Lapangan
 - .27 Rumah
- .3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
 - .31 Galian Tanah
 - .32 Timbunan Tanah
- .4 Pondasi
 - .41 Pondasi Kepala Jembatan
 - .42 Pondasi Pilar
 - .43 Pondasi Angker
- .5 Bangunan Bawah
 - .51 Kepala Jembatan
 - .52 Pilar
 - .53 Piloon
 - .54 Landasan
- .6 Bangunan
 - .61 Gelagar
 - .62 Lantai
 - .63 Perkerasan
 - .64 Jalan Orang (Trottoir)
 - .65 Sandaran
 - .66 Talang Air
- .7 Bangunan Pengamanan
 - .71 Turap/Penahan
 - .72 Bronjong
 - .73 Strek Dam
 - .74 Kiset Dam
 - .75 Corpure
 - .76 Krib
- .8 Bangunan Pelengkap
 - .81 Rambu-rambu/Tanda-tanda lalu lintas

- .82 Lampu Penerang
- .83 Lampu Pengaturan Lalu lintas
- .84 Patok Pengaman
- .85 Patok Row (Sempadan)
- .86 Pagar
- .9 Sprit (Oprit)
 - .91 Badan
 - .92 Perkerasan
 - .93 Drainage
 - .94 Buku
 - .95 Median
- 632 Jembatan Pada Jalan Luar kota
 - .1 Daerah Penguasa
 - .11 Tanah
 - .12 Tanaman
 - .13 Bangunan
 - .2 Bangunan Sementara
 - .21 Jalan Sementara
 - .22 Jembatan Sementara
 - .23 Kantor Proyek
 - .24 Gudang Proyek
 - .25 Barak Kerja
 - .26 Laboratorium Lapangan
 - .27 Rumah
 - .3 Pekerjaan Tanah
 - .31 Galian Tanah
 - .32 Timbunan
 - .4 Pondasi
 - .41 Pondasi Kepala Jembatan
 - .42 Pondasi Pilar
 - .43 Pondasi Angker
 - .5 Bangunan Bawah
 - .51 Kepala Jembatan
 - .52 Pilar
 - .53 Pilon
 - .54 Landasan
 - .6 Bangunan Atas
 - .61 Gelagar
 - .62 Lantai

		.63	Perkerasan
		.64	Jalan Orang (Trotoar)
		.65	Sandaran
		.66	Talang Air
	.7		Bangunan Pengaman
		.71	Turap/Penahan
		.72	Brojong
		.73	Strek Dam
		.74	Kiset Dam
		.75	Courpore
		.76	Krib (Kriup)
	.8		Bangunan Pelengkap
		.81	Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu lintas
		.82	Lampu Penerang
		.83	Lampu Pengatur Lalu lintas
		.84	Pertokoan Pengaman
		.85	Potok Row (sempadan)
		.86	Pagar
	.9		Sprit/Oprit
		.91	Badan
		.92	Perkerasan
		.93	Drainage
		.94	Bahu
		.95	Median
633	-		
634	-		
635	-		
636	-		
637	-		
638	-		
639	-		

640. BANGUNAN

641	Bangunan Pemerintah
.1	Gedung Pengadilan
.2	Rumah Pejabat Negara
.3	Gedung DPRD
.4	Gedung Balai Kota
.5	Penjara

- .6 Perkantoran
- .7 Gedung Lainnya
- 642 Bangunan Pendidikan
 - .1 Taman Kanak-kanak
 - .2 SD, Sekolah Menengah
 - .3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan Rekreasi
 - .1 Bangunan Olahraga
 - .2 Gedung Kesenian
 - .3 Gedung Pemancar
 - .4 Gedung Lainnya
- 644 Bangunan Perdagangan
 - .1 Pusat Perbelanjaan
 - .2 Gedung Perdagangan
 - .3 Bank
 - .4 Perkantoran, dll
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
 - .1 Mandi, Cuci , Kakus (MCK) Umum
 - .2 Gedung Parkir
 - .3 Rumah Sakit
 - .4 Gedung Telkom
 - .5 Terminal Angkutan Udara
 - .6 Terminal Angkutan Air
 - .7 Terminal Angkutan Darat
 - .8 Bangunan Keagamaan
 - .9 Bangunan Lainnya
- 647 Bangunan Peninggalan Sejarah
 - .1 Monumen
 - .2 Candi
 - .3 Keraton
 - .4 Rumah Tradisional
 - .5 Rumah lainnya
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
 - .1 Rumah Perkotaan
 - .11 Inti/Sederhana
 - .12 Sedang/Mewah
 - .2 Rumah Pedesaan
 - .21 Rumah contoh

- .3 Real Estate
 - .31 Rumah BTN
 - .32 Rumah Perumnas
- 649 Elemen Bangunan
 - .1 Pondasi
 - .11 Di atas Tiang
 - .2 Dinding
 - .21 Menahan Beban
 - .22 Tidak Menahan Beban
 - .3 Atap
 - .31 Atap Genteng
 - .32 Atap Asbes
 - .33 Atap Seng
 - .4 Lantai/Langit-langit
 - .41 Suspended
 - .42 Solit
 - .5 Pintu/Jendela
 - .51 Pintu Harmonik
 - .52 Pintu Biasa
 - .53 Pintu Sorok (Sorong)
 - .54 Jendela Kayu
 - .55 Jendela Sorok (Sorong)
 - .56 Jendela Vertikal
- 650 TATA KOTA
 - 651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan
 - .1 Daerah Pusat Perbelanjaan
 - .2 Daerah Perkotaan
 - 652 Daerah Pemerintahan
 - 653 Daerah Perumahan (Site dan Service)
 - .1 Kepadatan Rendah (Low Density)
 - .2 Kepadatan Tinggi (High Density)
 - 654 Daerah Industri
 - .1 Industri Berat
 - .2 Industri Ringan
 - .3 Industri Rumah (Home Industry)
 - 655 Daerah Rekreasi
 - .1 Taman Kota (Public garden)
 - .2 Sport and Playing Fields

- .3 Open Space
- 656 Transportasi
 - .1 Jaringan Jalan
 - .11 Penerangan Jalan
 - .2 Jaringan Kereta Api
 - .3 Jaringan Sungai
- 657 Assainering
 - .1 Saluran Pengumpulan
 - .2 Saluran Pengolahan
 - .21 Bangunan
 - .211 Bangunan Penyaring
 - .212 Bangunan Penghancur Kotoran/Sampah
 - .213 Bangunan Pengendapan
 - .214 Bangunan Pengering Lumpur
 - .22 Unit Desinfektan
 - .23 Unit Pemompaan
- 658 Kesehatan Lingkungan
 - .1 Persampahan
 - .11 Bangunan Pengumpul
 - .12 Bangunan Pemusnahan
 - .2 Pengotoran Udara
 - .3 Pengotoran Air
 - .31 Air Buangan Industri/Limbah
 - .4 Kegaduhan
 - .5 Kebersihan Kota
- 659 -
- 660 TATA LINGKUNGAN
 - .1 Lingkungan Hidup
 - .2 Kebersihan Lingkungan
 - .3 Pencemaran
 - .31 Pencemaran Air
 - .32 Pencemaran Udara
 - .33 Pencemaran Limbah B3
- 661 Daerah Hutan
- 662 Daerah Pertanian/Perkebunan
- 663 Daerah Pemukiman
- 664 Pusat Pertumbuhan
- 665 Transportasi

	.1	Jaringan Jalan
	.2	Jaringan Kereta Api
	.3	Jaringan Sungai
666	-	
667	-	
668	-	
669	-	
670	KETENANGAN	
671	Listrik	
	.1	Kelistrikan
	.11	Kelistrikan PLN
	.12	Kelistrikan Non PLN
	.2	Pembangkit Tenaga Listrik
	.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
	.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
	.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
	.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
	.25	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
	.26	PLTPB - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
	.27	PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
	.28	Pembangkit Listrik Tenaga lainnya
	.3	Transmisi Tenaga Listrik
	.31	Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
	.32	Saluran Udara Tegangan Tinggi
	.33	Kabel Bawah Tanah
	.34	Kabel Bawah Laut/Air
	.4	Distribusi Tenaga Listrik
	.41	Gardu Distribusi
	.42	Tegangan Rendah
	.43	Tegangan Menengah
	.44	Tegangan Tinggi
	.45	Jaringan Bawah Tanah
	.5	Penguasaan Listrik
	.51	Sambungan Listrik
	.52	Penjualan Tenaga Listrik
	.53	Tarif Listrik
	.54	Instalatur Listrik

672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN
681	Peralatan Berat
682	Peralatan Ringan
683	-
684	-
685	-
686	-
687	-
688	-
689	-
690	AIR MINUM
691	Intake
	.1 Broncaptering
	.2 Sumur
	.21 Sumur Pompa
	.22 Sumur Artesis
	.3 Bendungan
	.4 Saringan (Screen)
	.5 Pintu Air
	.6 Saluran Pembawa
	.7 Alat Ukur
	.8 Perpompaan
692	Transmisi Air Beku
	.1 Perpipaian
	.2 Katup Udara (Air Relief)
	.3 Kutup Penguras (Blow Off)
	.4 Bak Pelepas Tekanan
	.5 Jembatan Pipa
	.6 Siphon

- 693 Instalasi Pengelolaan
 - .1 Bangunan Ukur
 - .2 Bangunan Areasi
 - .3 Bangunan Pengendapan
 - .4 Bangunan Penyuluh Bahan Kimia
 - .5 Bangunan Pengaduk
 - .6 Bangunan Saringan
 - .7 Perpompaan
 - .8 Clear Hell
- 694 Distribusi
 - .1 Reservoir Menara Bawah Tanah
 - .11 Menara
 - .12 Reservoir Di bawah Tanah
 - .2 Perpipaan
 - .3 Perpompaan
 - .4 Jembatan Pipa
 - .5 Siphon
 - .6 Hydrant
 - .61 Hydrant Umum
 - .62 Hydrant Kebakaran
 - .7 Katup
 - .71 Katup Udara (Air Relief)
 - .72 Kutup Pelepas (Blow off)
 - .8 Bak Pelepas Tekanan (Pressure Reducing Valve)
- 695 Perusahaan Daerah Air Minum
- 696 -
- 697 -
- 698 -
- 699 -

700

PENGAWASAN

- 700 PENGAWASAN
- 701 Bidang Urusan Dalam
- 702 Bidang Peralatan
- 703 Bidang Kekayaan Daerah
- 704 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi
- 705 Bidang Perencanaan

- 706 Bidang Organisasi
- 707 Bidang Penelitian
- 708 Bidang Konferensi
- 709 Bidang Perjalanan Dinas

- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
 - 711 Bidang Pemerintahan Pusat
 - 712 Bidang Pemerintahan Provinsi
 - 713 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota
 - 714 Bidang Pemerintahan Desa
 - 715 Bidang MPR/DPR
 - 716 Bidang DPR Provinsi
 - 717 Bidang DPR Kabupaten/Kota
 - 718 Bidang Hukum
 - 719 Bidang Hubungan Luar Negeri

- 720 BIDANG POLITIK
 - 721 Bidang Kepartaian
 - 722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
 - 723 Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional
 - 724 Bidang Organisasi Pemuda
 - 725 Bidang Organisasi Buruh, Tani, Dan Nelayan
 - 726 Bidang Organisasi Wanita
 - 727 Bidang Pemilihan Umum
 - 728 -
 - 729 -

- 730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
 - 731 Bidang Pertahanan
 - 732 Bidang Kemiliteran
 - 733 Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 734 Bidang Keamanan
 - 735 Bidang Kejahatan
 - 736 Bidang Bencana
 - 737 Bidang Kecelakaan
 - 738 -
 - 739 -

- 740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 741 Bidang Pembangunan Desa
 - 742 Bidang Pendidikan
 - 743 Bidang Kebudayaan
 - 744 Bidang Kesihatan
 - 745 Bidang Agama
 - 746 Bidang Sosial
 - 747 Bidang Kependudukan
 - 748 Bidang Media Massa
 - 749 -
- 750 BIDANG PEREKONOMIAN
- 751 Bidang Perdagangan
 - 752 Bidang Pertanian
 - 753 Bidang Perindustrian
 - 754 Bidang Pertambangan/Kesamudraan
 - 755 Bidang Perhubungan
 - 756 Bidang Tenaga Kerja
 - 757 Bidang Permodalan
 - 758 Bidang Perbankan/Moneter
 - 759 Bidang Agraria
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
- 761 Bidang Pengairan
 - 762 Bidang Jalan
 - 763 Bidang Jembatan
 - 764 Bidang Bangunan
 - 765 Bidang Tata Kota
 - 766 Bidang Lingkungan
 - 767 Bidang Ketenangan
 - 768 Bidang Peralatan
 - 769 Bidang Air Minum
- 770 -
- 771 -
 - 772 -
 - 773 -
 - 774 -
 - 775 -

776 -
777 -
778 -
779 -

780 BIDANG KEPEGAWAIAN

781 Bidang Pengadaan Pegawai
782 Bidang Mutasi Pegawai
783 Bidang Kedudukan Pegawai
784 Bidang Kesejahteraan Pegawai
785 Bidang Cuti
786 Bidang Penilaian
787 Bidang Tata Usaha Kepegawaian
789 Bidang Pemberhentian Pegawai

790 BIDANG KEUANGAN

791 Bidang Anggaran
792 Bidang Otorisasi
793 Bidang Verifikasi
794 Bidang Pembukuan
795 Bidang Perbendaharaan
796 Bidang Pembina Kebendaharaan
797 Bidang Pendapatan
798 -
799 Bidang Bendaharaan

800

KEPEGAWAIAN

800 KEPEGAWAIAN

Klasifikasi Di sini: Kebijakanaksanaan Pegawai

.1 Perencanaan
.2 Penelitian
.043 Pengaduan
.05 Tim
.07 Statistik
.08 Peraturan Perundang-undangan
801 -
802 -

- 803 -
- 804 -
- 805 -
- 806 -
- 807 -
- 808 -
- 809 -

810 PENGADAAN

Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai

- 811 Lamaran
 - .1 Testing
 - .2 Screening
 - .3 Panggilan
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
 - .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
 - .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
 - .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
 - .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
 - .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres/Guru Bantu
- 814 Pengangkatan Lepas
 - .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
 - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
 - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
- 815 -
- 816 -
- 817 -
- 818 -
- 819 -

820 MUTASI

Meliputi: Pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, Pemindahan, perlimpahan, datasinggung, tugas belajar, wajib militer, dsb

- 821 Pengangkatan
 - .1 Pengangkatan menjadi Pegawai Tetap
 - .11 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan I
 - .12 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan II

- .13 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan III
 - .14 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan IV
 - .15 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara
 - .16 Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan
- .2 Berita Acara Serah Terima Jabatan
- .21 Sekjen/Dirjen/Kabag Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala
 - .22 Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekwilda /kepala Bagian/Kepala SubDirektorat/kepala
 - .23 Bidang/Inspektur Pembantu Kepala Sub Bagian Kepala Seksi/Kepala
 - .24 Bidang/Pemeriksa
 - .25 Residen/Pembantu Gubernur
 - .26 Wedana/Pembantu Bupati
 - .27 Kepala Distrik
 - .28 Lurah Administratif (Lurah Desa)
 - .29 Jabatan Lainnya
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
- .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 823 Kenaikan Pangkat/Pengangkatan
- .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
- 824 Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan
- .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
 - .5 Lolos Butuh
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali
- 826 Penunjukan Tugas Belajar
- .1 Dalam Negeri
 - .2 Luar Negeri

- .3 Tunjangan Belajar
- .4 Penempatan Kembali
- 827 Wajib Belajar
- 828 Mutasi Pegawai Instansi Lain
- 829 -

- 830 KEDUDUKAN
 - Meliputi: Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijazah dan Jenjang Pangkat
 - 831 Perhitungan Masa Kerja
 - 823 Penyesuaian Pangkat/Gaji
 - .1 Pegawai Golongan I
 - .2 Pegawai Golongan II
 - .3 Pegawai Golongan III
 - .4 Pegawai Golongan IV
 - 833 Penghargaan Ijazah/Penyesuaian
 - 834 Jenjang Pangkat/Eselonering
 - 835 -
 - 836 -
 - 837 -
 - 838 -
 - 839 -

- 840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI
 - Meliputi: Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Perumahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi dan Dispenasasi
 - 841 Tunjangan
 - .1 Jabatan
 - .2 Kehormatan
 - .3 Kematian/Uang Duka
 - .4 Tunjangan Hari Raya
 - .5 Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
 - .6 Keluarga
 - .7 Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum)
 - 842 Dana
 - .1 Taspen
 - .2 Kesehatan
 - .3 Asuransi
 - 843 Perawatan Kesehatan

- .1 Poliklinik
- .2 Perawatan Dokter
- .3 Obat-Obatan
- .4 Keluarga Berencana
- 844 Koperasi/Distribusi
 - .1 Distribusi Pangan
 - .2 Distribusi Sandang
 - .3 Distribusi Papan
- 845 Perumahan/Tanah
 - .1 Perumahan Pegawai
 - .2 Tanah kapling
 - .3 Losmen/Hotel
- 846 Bantuan Sosial
 - .1 Bantuan Kebakaran
 - .2 Bantuan Kebanjiran
- 847 -
- 848 -
- 849 -

- 850 CUTI

Meliputi: Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti diluar Tanggungan Negara dan Cuti Alasan Lain

 - 851 Cuti Tahunan
 - 852 Cuti Besar
 - 853 Cuti Sakit
 - 854 Cuti Hamil
 - 855 Cuti Naik Haji/Umroh
 - 856 Cuti Diluar Tanggungan Negara
 - 857 Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
 - 858 -
 - 859 -

- 860 PENILAIAN

Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas penilaian Kekayaan Peibadi dan Rehabilitas

 - 861 Penghargaan
 - .1 Bintang/Satyalencana
 - .2 Kenaikan Pangkat Anumerta
 - .3 Kenaikan Gaji Istimewa

- .4 Hadiah berupa Uang
- .5 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
 - .1 Teguran Peringatan
 - .2 Penundaan Kenaikan Gaji
 - .3 Penurunan Pangkat
 - .4 Pemindahan

Catatan : Pemberhentian Untuk sementara waktu dan pemberitahuan Tidak dengan hormat lihat 887 dan 888
- 863 Kondite, DP3, Disiplin Pegawai
- 864 Ujian Dinas
 - .1 Tingkat I
 - .2 Tingkat II
 - .3 Tingkat III
- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai negeri
Meliputi: Petunjuk pelaksanaan hidup sederhana, penilaian kekayaan Pribadi (LP2P)
- 866 Rehabilitasi/Pengaktifan kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -

870 TATA USAHA PEGAWAIAN

- Meliputi: Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat, Hak Penggajian, Sumpah/Janji dan Korps Pegawai
- 871 Formasi
 - 872 Bezetting
 - 873 Registrasi
 - .1 NIP
 - .2 KARPEG
 - .3 Legitimasi/Tanda Pengenal
 - .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu
 - 874 Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan
 - .1 Tanggal Lahir
 - .2 Penggantian Nama
 - .3 Izin Kepartaian/Organisasi
 - 875 Kewenangan Mutasi Pegawai
 - .1 Pelimpahan Wewenang
 - .2 Spacing Tanda Tangan

- 876 Penggajian
 - .1 SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai
- 879 -

880 PEMBERHENTIAN

Meliputi: Atasan Pemberhentian, permintaan sendiri, dengan hak pensiun Karena meninggal dunia, alasan lain, dengan diberi uang pesangon, uang tunggu untuk sementara waktu dan pemberhentian dengan tidak hormat

- 881 Permintaan Sendiri
- 882 Dengan Hak Pensiun
 - .1 Golongan 1
 - Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai golongan 1
 - .2 Golongan 2
 - Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai Negeri golongan II
 - .3 Golongan 3
 - Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai Negeri golongan III
 - .4 Golongan 4
 - Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai Negeri golongan IV
 - .5 Pensiun Janda/Duda
 - .6 Pensiun Yatim Piatu
 - .7 Uang Muka Pensiun
 - .8 Pensiun Dini
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena meninggal dalam tugas
- 884 Alasan Lain
- 885 Uang Pasangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk sementara waktu
- 888 Tidak dengan hormat
- 889 -

890 PENDIDIKAN PEGAWAI

Meliputi: Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non Reguler, Pendidikan ke Luar Negeri, Metode, Tenaga pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan

- 891 Perencanaan
 - .1 Program
 - .2 Kurikulum dan Silabi
 - .3 Proposal (TOR)
- 892 Pendidikan Reguler/Kader
 - .1 IPDN/STPDN
 - .2 Kursus-Kursus Reguler
- 893 Pendidikan Dan Latihan/Non Reguler
 - .1 LEMHANAS
 - Pendidikan Dan pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN
 - .2 SPAMA, ADUMLA, ADUM
 - .3 Kursus kursus/Penataran
 - .4 Diklat teknik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan
 - .5 Diklat Lainnya
- 894 Pendidikan Luar Negeri
 - .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar
 - .2 Nongelar/Diploma
- 895 Metode
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
 - .4 Studi Lapangan, KKN, Widyawisata
 - .5 Tanya Jawab/Silabus/Modul/Kursil
 - .6 Penugasan
 - .7 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Narasumber
 - .1 Moderator
- 897 Administrasi Pendidikan
 - .1 Tahun Pelajaran
 - .2 Persyaratan, meliputi pendaftaran, testing, Ujian
 - .3 STTP
 - .4 Penilaian Angka kredit
 - .5 Laporan Pendidikan Dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar
 - .2 Asrama

- .3 Uang Makan
 - .4 Uang Transport
 - .5 Uang Buku
 - .6 Uang Ujian
 - .7 Uang Semester/Uang kuliah
 - .8 Uang Saku
- 899 Sarana
- .1 Bantuan Sarana Belajar
 - .2 Bantuan Alat-Alat Tulis
 - .3 Bantuan Sarana Belajar Lainnya.

900
KEUANGAN

- 900 KEUANGAN
- 901 Nota Keuangan
 - 902 APBN
 - 903 APBD
 - 904 APBN-P
 - 905 Dana Alokasi Umum
 - 906 Dana Alokasi Khusus
 - 907 Dekonsentrasi (Perlimpahan Dana Dari Pusat Ke Daerah)
 - 908 -
 - 909 -
- 910 ANGGARAN
- 911 Rutin/BTL
 - 912 Pembangunan/BL
 - 913 Anggaran Belanja Tambahan
 - 914 Daftar Isian Kegiatan (DIK)
 - .1 Daftar Usulan Kegiatan (DuK)
 - 915 Daftar Isian Proyek (DIP)/DPA
 - .1 Daftar Usulan Proyek (DUP)/RKA
 - .2 Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
 - 916 Revisi Anggaran
 - 917 -
 - 918 -
 - 919 -

- 920 OTORISASI/SKO
 - 921 Rutin/BTL
 - 922 Pembangunan/BL
 - 923 SIAP
 - 924 Ralat SKO
 - 925 -
 - 926 -
 - 927 -
 - 928 -
 - 929 -

- 930 VERIFIKASI
 - 931 SPM Rutin (Daftar P8)
 - 932 SPM Pembangunan (Daftar p8)
 - 933 Penerimaan (Daftar P6, P7)
 - 934 SPJ Rutin/BTL
 - 935 SPJ Pembangunan/BL
 - 936 Nota Pemeriksa
 - 937 SP Pemindahan Pembukuan
 - 938 -
 - 939 -

- 940 PEMBUKUAN
 - 941 Penyusunan Perhitungan Anggaran
 - 942 Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan
 - 943 Laporan Fisik Pembangunan
 - 944 -
 - 945 -
 - 946 -
 - 947 -
 - 948 -
 - 949 -

- 950 PERBENDAHARAAN
 - 951 Tuntutan Ganti Rugi (ICU Pasal 74)
 - 952 Tuntutan Bendaharawan
 - 953 Penghapusan Kekayaan Negara
 - 954 Pengangkatan/pergantian pimpinan proyek dan Pengangkatan/pemberhentian bendaharawan

- 955 Specimen Tanda Tangan
- 956 Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
- 957 -
- 958 -
- 959 -

- 960 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
 - 961 Pemeriksaan Kas dan hasil Pemeriksaan Kas
 - 962 Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
 - 963 Laporan Keuangan Bendaharawan
 - 964 -
 - 965 -
 - 967 -
 - 968 -
 - 969 -

- 970 PENDAPATAN
 - 971 Perimbangan Keuangan
 - 972 Subsidi
 - 973 Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
 - 974 Retribusi
 - 975 Bea
 - 976 Cukai
 - 977 Pungutan/PNBP
 - 978 Bantuan Presiden, Mentari dan Bantuan lainnya
 - 979 Pendapatan lainnya
 - .1 Hasil penjualan Asct Daerah Yang Tidak Dipisahkan
 - .11 Pelepasan Hak Atas Tanah
 - .12 Penjualan Rumah Jabatan, Rumah Dinas
 - .13 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
 - .14 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
 - .15 Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris
 - .16 Penjualan Drum Bekas
 - .17 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
 - .2 Penerimaan Jasa Giro
 - .21 Jasa Giro Kas Daerah
 - .22 Jasa Giro Pemegang Kas
 - .23 Jasa Giro Khusus
 - .3 Penerimaan Bunga Bank

- .31 Bunga deposito
- .32 Bunga Tabungan
- .4 Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian/Kehilangan Kekayaan daerah (TPTGR)
 - .41 Sumbangan Pihak Ketiga
 - .42 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
 - .43 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
- .5 Penerima Lain-Lain
 - .51 Penerima Kembali Kredit BKK
 - .52 Ternak Tidak Layak Bibit
 - .53 Sewa Internet
 - .54 Penerimaan Dan Dana Bergulir
 - .55 Kerjasama Dengan Bumida
 - .56 Penerimaan DUKS
 - .57 Tempat Rekreasi Nusakembangan
 - .58 Setoran TPTGR
 - .59 Penerimaan Lainnya dari Setda/Dinas-Dinas

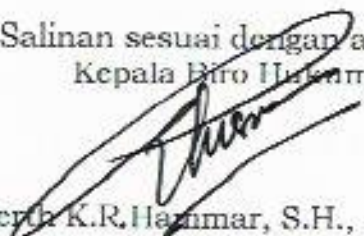
980

- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989

990 BENDAHARAWAN

- 991 SKPP/SPP
- 992 Teguran SPJ
- 993 -
- 994 -
- 995 -

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Robert K.R. Hammar, S.H., M.Hum., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 196508181992031022

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN